



**DAMPAK KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU (PPDB) DI SMP NEGERI 3 BATUSANGKAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi (S-1)
Pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam*

OLEH:

VONI RAMADHANI
NIM. 1930103101

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1446H/2025M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


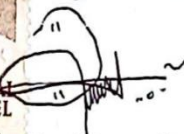
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Voni Ramadhani
NIM : 1930103101
Tempat, Tanggal Lahir : Parambahan,07 Desember 2000
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“DAMPAK KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMP NEGERI 3 BATUSANGKAR”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 18 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Voni Ramadhani
NIM. 1930103101

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **VONI RAMADHANI**, NIM: 1930103101 dengan judul: **DAMPAK KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMP NEGERI 3 BATUSANGKAR**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan untuk diajukan Agenda Skripsi setelah sidang *munaqasyah*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 18 Februari 2025

Pembimbing



Dr. D. Dina, M.Pd

NIP. 196906252000032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **VONI RAMADHANI**, NIM: 1930103101, dengan judul: **DAMPAK KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMP NEGERI 3 BATUSANGKAR**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Selasa, 4 Februari 2025 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat penyelesaian studi (S1) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Yanti Elvita, S.Ag.,M.Pd NIP.197104122002122002	Ketua Penguji		17/2 - 2025
2	Dr. Demina, M.Pd NIP.196906252000032001	Sekretaris Penguji		17/2 - 25
3	Husnani, S.Pd.I.,M.Pd.I NIP.198301162023212021	Anggota Penguji		14/2 - 2025

Batusangkar, 16 Februari 2025
Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Dr. Ridwal Urisoni, S.Ag., M.Pd
NIP. 19710526199503 1 001

ABSTRAK

Voni Ramadhani, NIM 1930103101, judul skripsi: **“Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMPN 3 Batusangkar”**, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan sistem zonasi di sekolah menyebabkan pembatasan yang cukup besar terhadap kesempatan siswa dalam memilih sekolah yang siswa inginkan. Dalam sistem ini, siswa hanya dapat mendaftar di sekolah yang berada dalam wilayah geografis tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Akibatnya, kebebasan siswa dalam menentukan sekolah yang diinginkan menjadi terbatas, terutama jika sekolah tujuan mereka berada di luar zona yang ditentukan. Kondisi ini menimbulkan ketidaksetaraan akses pendidikan, di mana siswa hanya dapat memilih sekolah di sekitar tempat tinggal mereka. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak positif yang ditimbulkan setelah diterapkannya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 3 Batusangkar, 2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak negatif yang ditimbulkan setelah diterapkannya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 3 Batusangkar.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Alat yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa buku tulis, handphone, dan pulpen. Buku tulis dan pulpen digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh dari informan. Sedangkan handphone digunakan untuk mengambil dokumentasi atau bukti foto bersama informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Adapun hasil penelitian ini yakni: 1) Dampak positif kebijakan sistem zonasi PPDB SMPN 3 Batusangkar yaitu: a)memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh siswa, b) Memeratakan kualitas sekolah, c) Mengurangi dan menghemat biaya transportasi, d) Memudahkan guru dalam mengajar, e) Jarak lokasi yang dekat. 2) Dampak negatif kebijakan sistem zonasi PPDB SMPN 3 Batusangkar yaitu: a) membatasi pilihan sekolah bagi siswa, b) masih ada anggapan sekolah favorit dan non favorit

ABSTRACT

Voni Ramadhani, NIM 1930103101, Thesis Title: "The Impact of the Zoning System Policy in the New Student Admission (PPDB) at SMPN 3 Batusangkar", Islamic Education Management Study Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Mahmud Yunus State Islamic University (UIN) Batusangkar, 2025.

This research is motivated by the implementation of the zoning system in schools, which significantly limits students' opportunities to choose the school they desire. Under this system, students can only enroll in schools within a specific geographic area as determined by regulations. As a result, students' freedom to choose their preferred school is restricted, especially if their desired school is outside the designated zone. This situation creates educational inequality, as students can only select schools near their residences. This study aims to: 1) Analyze and describe the positive impacts of implementing the zoning system policy in the New Student Admission (PPDB) at SMPN 3 Batusangkar, and 2) Analyze and describe the negative impacts of implementing the zoning system policy in the New Student Admission (PPDB) at SMPN 3 Batusangkar.

The research employs a qualitative research method with a case study approach. The tools used in this study include a notebook, a mobile phone, and a pen. The notebook and pen are used to record information obtained from informants, while the mobile phone is used for documentation or photographic evidence with informants. Data collection techniques in this study involve interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis process includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. To ensure data validity, the researcher used source triangulation. The results of this study are as follows: 1) The positive impacts of the zoning system policy in PPDB at SMPN 3 Batusangkar include: a) Providing equal opportunities for all students, b) Equalizing the quality of schools, c) Reducing and saving transportation costs, d) Facilitating teachers in teaching, e) Proximity to school locations. 2) The negative impacts of the zoning system policy in PPDB at SMPN 3 Batusangkar include: a) Limiting students' school choices, b) The continued perception of "favorite" and "non-favorite" schools.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Pertanyaan Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	7
F. Definisi Istilah	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Landasan Teori	9
1. Kebijakan	9
2. Sistem Zonasi.....	12
3. Akses Pendidikan.....	32
4. Kualitas Pendidikan	33
B. Penelitian yang relevan.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Latar dan Waktu Penelitian	43
C. Instrumen Penelitian	44
D. Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	46

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Temuan Umum	49
a. Identifikasi Sekolah.....	49
b. Sejarah SMPN 3 Batusangkar	49
c. Visi dan Misi SMPN 3 Batusangkar	50
d. Tujuan SMPN 3 Batusangkar.....	51
e. Lokasi SMPN 3 Batusangkar	52
f. Data Siswa Baru SMPN 3 Batusangkar	52
g. Data Wilayah dan Jarak.....	53
h. Sarana dan Prasarana SMPN 3 Batusangkar.....	53
i. Data Prestasi Sekolah.....	54
2. Temuan Khusus	55
a. Dampak Positif Sistem Zonasi di SMPN 3 Batusangkar	56
b. Dampak Negatif Sistem Zonasi PPDB SMPN 3 Batusangkar.....	79
B. Pembahasan	87
1. Sistem Zonasi.....	87
2. Dampak Positif Sistem Zonasi PPDB.....	88
3. Dampak Negatif Sistem Zonasi PPDB	92
A. Kesimpulan	95
B. Saran	95
DAFTAR KEPUSTAKAAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Profil SMPN 3 Batusangkar.....	49
Tabel 4.2 Jumlah Peserta Didik Baru SMP Negeri 3 Batusangkar.....	52
Tabel 4.3 Data Wilayah dan Jarak SMP Negeri 3 Batusangkar	53
Tabel 4.4 Data Sarana dan Prasarana SMPN 3 Batusangkar	53
Tabel 4.5 Prestasi Akademik Dan Non-Akademik Tahun 2022.....	54
Tabel 4.6 Prestasi Akademik Dan Non-Akademik Tahun 2023-2024	54
Tabel 4.7 Jumlah Peserta Didik Baru SMP Negeri 3 Batusangkar.....	59
Tabel 4.8 Data Wilayah dan Jarak SMP Negeri 3 Batusangkar	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Lokasi SMPN 3 Batusangkar	52
Gambar 4.2 Brosur Sekolah	58
Gambar4.3 belajar kelompok di perpustakaan.....	78
Gambar4.4 Kegiatan Jantung Sehat se-kecamatan Lima Kaum di SMPN 3 Batusangkar	79
Gambar 4.5 Kegiatan Lomba Nasyid se-Sumatera Barat di SMPN 3 Batusangkar	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak lepas dari kehidupan bangsa agar bisa beradaptasi dengan perubahan dunia. Tanpa pendidikan manusia tidak akan mampu berkembang menjadi manusia yang melangkah lebih jauh mencapai cita-cita yang diimpikan. Pendidikan, keterampilan, pengetahuan dan modal yang harus kita miliki untuk hidup di zaman sekarang yang serba sulit (Chan et al., 2019)

Mutu pendidikan menjadi faktor utama dalam memperluas wawasan dan pengetahuan, yang pada akhirnya membentuk karakter generasi penerus bangsa agar siap menghadapi berbagai tantangan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara (Ramadhan, 2023). Hal ini ditegaskan dalam pasal 11 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memerintahkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan, dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi. Peningkatan layanan pendidikan sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Pemerataan pendidikan diindonesia merupakan strategi untuk menaikkan standar pendidikan (Khadowmi, 2019).

Pendidikan di negara ini telah menjadi salah satu perhatian utama, terutama dalam upaya memastikan pemerataan akses bagi seluruh warga di Indonesia. Dalam pemerataan akses pendidikan, terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama, kesetaraan kesempatan dalam memperoleh pendidikan, yaitu memastikan bahwa setiap individu yang berada dalam usia sekolah dapat menikmati akses pendidikan. Kedua, keadilan dalam mendapatkan pendidikan yang setara di masyarakat, sehingga setiap orang, tanpa memandang suku, agama, atau kelompok,

memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan (Nurlailiyah, 2022).

Penerapan pemerataan pendidikan terdapat perbedaan yang mencolok antara sekolah di kota-kota besar dan di daerah pedesaan atau terpencil. Sekolah di perkotaan umumnya memiliki sarana dan prasarana yang lebih maju, sementara di daerah terpencil masih banyak yang menggunakan fasilitas seadanya, bahkan menghadapi kekurangan tenaga pengajar. Padahal, sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan yang baik terhadap fasilitas pendidikan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Masalah ketimpangan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di pedesaan, tetapi juga masih ditemukan di beberapa wilayah perkotaan, di mana sistem pendidikan belum sepenuhnya merata (Risna et al., 2020).

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan Indonesia adalah dengan dilaksanakannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem zonasi mulai diterapkan sejak tahun 2016 dan mulai efektif pada tahun 2017. Kemudian, dikeluarkan peraturan kemendikbud No. 14 Tahun 2018, terdapat dalam pasal 16 ayat (1) yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima (Madiana et al., 2022). Disempurnakan oleh peraturan permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 mengenai penerimaan peserta didik baru di berbagai tingkatan jenjang pendidikan. Dimana dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa dalam pasal 11 ayat (1) pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui empat jalur yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi. Dimana daya tampung untuk jalur zonasi 50%, afirmasi 15%, perpindahan tugas orang tua 5% dan prestasi 30%. (Permendikbud No. 44, 2019).

Sistem zonasi merupakan sebuah metode di mana sekolah diwajibkan menerima siswa yang tinggal dalam radius terdekat. Tujuannya adalah agar sekolah dapat memberikan layanan pendidikan yang dekat dengan rumah atau tempat tinggal siswa. Dengan diberlakukannya sistem zonasi, sekolah tidak lagi dapat menerima siswa dari luar wilayah yang ditentukan karena pemerintah akan diatur berdasarkan jarak antara rumah siswa dan sekolah (Risna et al., 2020). Sistem ini memastikan bahwa siswa dapat bersekolah di tempat yang mudah dijangkau, memudahkan akses pendidikan dan membantu menciptakan pemerataan pendidikan. Sebagai akibat dari aturan ini, sekolah harus fokus pada siswa dalam zonanya dan tidak dapat menerima siswa dari luar wilayah yang ditentukan, sehingga seluruh proses penerimaan terpusat pada lokasi geografis.

Penerapan sistem zonasi dalam penentuan jarak antar sekolah berdampak pada siswa, sekolah, dan masyarakat. Saat ini, kebijakan zonasi hanya berlaku bagi institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan madrasah dan pesantren yang berada di bawah Kementerian Agama masih dapat menerima peserta didik tanpa batasan zonasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam sistem pendidikan, karena masyarakat cenderung memilih madrasah dan pesantren sebagai alternatif. Akibatnya, beberapa sekolah umum mengalami kesulitan dalam memenuhi kuota siswa. Selain itu, sekolah di wilayah dengan kebutuhan pendidikan tinggi mungkin menghadapi keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik akibat jumlah sekolah yang terbatas di zona tersebut. Sebaliknya, di daerah dengan jumlah sekolah berlebih, terdapat risiko inefisiensi sumber daya karena keberadaan sekolah yang kurang diminati namun tetap harus beroperasi sesuai aturan zonasi. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian kebijakan agar sistem zonasi dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pendidikan (Thoha & Ghazali, 2020).

Seperti yang telah dilakukan oleh (Madiana et al., 2022) yang melakukan penelitian di SMA N 1 Praya , bahwa penerapan dari Kebijakan sistem zonasi memberikan dampak bagi siswa, orang tua, guru, dan masyarakat. Harapan untuk bersekolah di institusi yang di inginkan seringkali terkikis, dengan hasil siswa terpaksa menerima kenyataan masuk sekolah yang bukan pilihan utama. kurangnya fasilitas di sekolah non-favorit menjadi alasan utama menurunnya minat belajar di sana. Akibatnya, sistem ini mendapat kritik dari masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih sekolah di luar zona tempat tinggal mereka. Selain itu, calon siswa baru hanya memiliki opsi sekolah berdasarkan zona yang ditetapkan, sementara sekolah hanya dapat menerima siswa dari zona terkait, mengurangi fleksibilitas dan pilihan bagi semua pihak yang terlibat.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Batusangkar merupakan salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang terletak di Jl. Sudirman Lima Kaum, Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat ini salah satu SMPN yang tidak terlalu unggul dari sekolah lain yang ada di kota Batusangkar tepatnya di Kabupaten Tanah Datar. Namun sekolah SMPN 3 Batusangkar ini cukup memiliki banyak siswa yang bersekolah di sekolah ini. Dimana tahun ini dengan melalui PPDB zonasi jumlah siswa meningkat, dengan jumlah siswanya 147 siswa, tahun sebelumnya hanya berjumlah 133 siswa. Selain jumlah siswa yang meningkat, SMPN 3 Batusangkar ini juga memiliki segudang prestasi, ini didapat dari sekolah dan sosial media sekolah, seperti disosial media Osissmp3bsk, sosial media tersebut official Account of OSIS SMP 3 Batusangkar maupun dari spanduk yang ditempel sekolah di depan gerbang SMPN 3 Batusangkar dan diluar ruang Tata Usaha. Seperti Cerdas Qur'an, sekolah ini meraih juara 3 tingkat kabupaten, kemudian mengikuti kejuaraan Rangkaing 1 se-Sumatra Barat dengan meraih juara 1. Kemudian melalui Kejuaraan Tinju Walikota Padang Ke-3, sekolah ini meraih juara umum 2 se-Sumatera Barat. Kemudian kejuaraan sepak bola

tingkat kabupaten sekolah ini mendapat juara 1, dan kejuaraan sepak bola tingkat provinsi juara 3 se-Sumatera Barat. Selain itu, sekolah ini juga memiliki lingkungan yang nyaman dan bersih, warga sekolahnya yang ramah, sopan dan santun. Namun, dibalik itu semua penerapan sistem zonasi juga dapat berpengaruh tidak baik bagi sekolah maupun masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara di SMPN 3 Batusangkar, yang berlokasi di Jalan Sudirma-Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum Batusangkar, Ibu Yermala Dewita S.Pd selaku kepala sekolah menyampaikan bahwa Penerapan sistem zonasi di sekolah menyebabkan pembatasan signifikan terhadap kesempatan siswa dalam memilih sekolah yang mereka inginkan. Dalam sistem ini, pendaftaran siswa hanya diperbolehkan di sekolah yang berada dalam wilayah geografis tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibatnya, kebebasan siswa dalam menentukan sekolah impian mereka menjadi terbatas, terutama jika sekolah tersebut berada di luar zona yang telah ditetapkan. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, karena siswa hanya memiliki pilihan sekolah di sekitar tempat tinggal mereka. Dengan demikian, sistem zonasi tidak hanya mengurangi mobilitas siswa, tetapi juga membatasi fleksibilitas serta pilihan mereka dalam mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing.

Sistem zonasi dalam dunia pendidikan tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga memberikan manfaat bagi sejumlah siswa, terutama bagi mereka yang tinggal di dekat sekolah dalam wilayah zonasi mereka. Salah satu keuntungan utama dari sistem ini adalah kemudahan akses ke sekolah, yang tidak hanya memberikan kenyamanan bagi siswa tetapi juga mengurangi kekhawatiran orang tua terkait keselamatan dan keterlambatan anak-anak mereka saat berangkat ke sekolah. Selain itu, sistem zonasi turut mempererat hubungan dalam komunitas lokal. Dengan siswa yang berasal dari lingkungan yang sama, tercipta rasa kebersamaan dan solidaritas yang lebih kuat, baik antar siswa maupun antara sekolah dengan

masyarakat sekitar. Sistem ini juga memungkinkan sekolah untuk lebih fokus dalam memenuhi kebutuhan siswa di wilayahnya, karena populasi siswa yang lebih stabil dan terpusat. Akibatnya, sekolah dapat mengembangkan program pembelajaran yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik siswanya. Oleh karena itu, meskipun sistem zonasi menghadirkan sejumlah tantangan, perlu diakui bahwa terdapat pula manfaat yang signifikan bagi siswa dan komunitas yang dapat diperoleh dari penerapannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menelusuri lebih dalam permasalahan yang timbul akibat penerapan sistem zonasi di SMPN 3 Batusangkar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan tersebut dalam konteks sekolah ini, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruhnya terhadap sekolah, guru, siswa, dan masyarakat. Dengan menyoroti situasi yang terjadi di SMPN 3 Batusangkar, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana berbagai pihak merespons sistem zonasi, baik dari sisi positif maupun negatif. Melalui kajian terhadap permasalahan spesifik yang muncul di sekolah tersebut, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul "**Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 3 Batusangkar**"

B. Fokus Penelitian

Agar lebih terarahnya pembahasan ini maka peneliti merasa perlu untuk memberikan fokus penelitian yaitu:

1. Dampak positif ditimbulkan setelah diterapkannya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 3 Batusangkar
2. Dampak negatif ditimbulkan setelah diterapkannya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 3 Batusangkar

C. Pertanyaan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, di dapat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak positif ditimbulkan setelah diterapkannya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 3 Batusangkar?
2. Bagaimana dampak negatif ditimbulkan setelah diterapkannya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 3 Batusangkar?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak positif ditimbulkan setelah diterapkannya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 3 Batusangkar?
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak negatif ditimbulkan setelah diterapkannya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 3 Batusangkar?

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Manfaat dari temuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan peneliti khususnya mengenai dampak positif dan negatif kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMP Negeri 3 Batusangkar
2. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan masalah-masalah sistem zonasi kedepannya serta menjadi bahan acuan dan rujukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Dapat menjadi masukan atau kontribusi bagi pemerintah dan SMP Negeri terkait dampak kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Luaran penelitian ini adalah:

1. Agar temuan penelitian ini dapat diterbitkan di jurnal ilmiah.

2. Untuk menambah ilmu dan wawasan khususnya bagi Peneliti tentang dampak sistem zonasi dalam PPDB terhadap sekolah dan siswa.
3. Sebagai salah satu persyaratan akademis demi menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Istilah

Peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap perlu untuk menyamakan persepsi dalam memahami makna yang terkandung dalam Penelitian ini, yaitu:

Dampak Kebijakan yang Peneliti maksud disini adalah perubahan yang terjadi akibat penerapan dari suatu kebijakan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Sistem Zonasi yang Peneliti maksud disini adalah kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ditetapkan oleh pemerintah yang membatasi pendaftaran siswa berdasarkan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang peneliti maksud disini adalah proses seleksi siswa baru di jenjang pendidikan formal yang dilakukan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Pengelolaan proses pendidikan diatur sedemikian rupa oleh pemerintah di suatu negara melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah selama ini sudah berupaya keras mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan tidak terlalu mahal sehingga bisa terjangkau untuk semua kalangan, namun upaya yang sudah dilakukan masih terdapat kekurangan dan butuh perbaikan yang lebih intensif.

Kata "*kebijakan*" atau "*policy*" berasal dari bahasa Yunani "*polis*" yang berarti Negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Nur Cudai, (2019) mengemukakan bahwa *policia* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris "*policie*" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintah. Istilah "*kebijakan*" atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Secara umum kebijakan menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah tindakan yang memberikan arah.

Kebijakan merupakan sebuah peraturan yang ditegakkan, ditandai dengan perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari pihak yang mengembangkan maupun yang melaksanakan kebijakan. Menurut Ealau dan Pewitt dalam Uddin B. Sore, (2017: 3) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan upaya menuju tujuan tertentu. Masih dalam Uddin B. Sore, (2017: 3), Edi Suharto mengemukakan kebijakan merupakan

suatu ketentuan yang memuat prinsip-prinsip yang menunjukkan bagaimana bertindak secara terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan menurut Carl J. Federick dalam Demina (2023) sebagai program kegiatan yang diajukan oleh seseorang, sekelompok orang atau orang-orang dalam pemerintah di sebuah lingkungan yang mana dalam menetapkan dan melaksanakannya selalu terdapat tantangan dan peluang demi terwujudnya tujuan yang diharapkan. Sedangkan menurut James E Anderson dalam Demina (2023) mengatakan bahwa kebijakan adalah *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”*, yang artinya kebijakan merupakan suatu tindakan untuk memecahkan permasalahan seseorang ataupun kelompok dengan menggunakan langkah-langkah ataupun kerangka.

Dapat dinyatakan bahwa kebijakan merupakan seperangkat peraturan yang digunakan oleh sebuah organisasi atau pemerintah secara terencana dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Kebijakan Publik

Para ahli banyak menghasilkan definisi untuk menjelaskan arti kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Banyak pakar menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Tidak ada suatu organisasi yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

Kebijakan publik merupakan pilihan-pilihan bagian dari perencanaan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk keputusan yang mana dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang tertentu yang menyangkut tugas-tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas dan lain-lain.

Dye dalam Satria (2019) mengemukakan kebijakan publik adalah sesuatu dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kemudian menurut Indihono dalam Satria (2019) juga mengemukakan bahwa kebijakan publik dalam kerangka substansif adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Sehingga dapat diketahui keseluruhan tugas dan fungsi maupun wewenang yang dimiliki dan akan dilakukan oleh pemerintah ialah melalui kebijakan publik. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain.

Kemudian menurut Syafie dalam Satria (2019) juga menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah semacam jawaban suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya, menjadi pengatur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Sehingga dapat diketahui kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

Selain itu Nugroho dalam Satria (2019) juga mengemukakan pemahaman mengenai kebijakan publik sebagai berikut:

- 1). Kebijakan publik adalah yang dibuat oleh administrator negara, administrator publik, jadi kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah.
- 2). Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan seseorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua domain yang ada di lembaga administrator publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu.

- 3). Dikatakan kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak dari pengguna langsungnya.

Menurut Wahab dalam Ramadhani (2017) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai tindakan yang dilakukan secara kebetulan, kebijakan publik dilakukan secara terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu, kebijakan publik bersifat positif maupun negatif.

Dapat dinyatakan bahwa kebijakan publik merupakan aktivitas pemerintah yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan masyarakat yang dilakukan secara terukur dalam bidang tertentu.

2. Sistem Zonasi

a. Pengertian Sistem Zonasi

Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan untuk memperbaiki mutu pendidikan, guna mewujudkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kompeten, berkarakter, dan unggul. Solusi alternatif dalam mengatasi ketidakmerataan pendidikan di Indonesia adalah penerapan sistem zonasi, sebagai kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan radius zona antara sekolah dengan tempat siswa terkait berdomisili.

Menurut Werdiningsih, (2020) Sistem zonasi merupakan kebijakan reformasi dalam distribusi distrik sekolah. Sistem zonasi yang berlaku sekarang ini adalah dasar dari penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem zonasi adalah sistem penerimaan siswa baru dengan memperhatikan antara sekolah dan domisili siswa baru.

Menurut Darwis, (2020) Sistem zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan jarak antara sekolah dengan rumah calon siswa baru selambat-lambatnya 6 bulan sebelum alamat kartu keluarga diterbitkan sebelum PPDB. Sistem zonasi pada PPDB merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2017 yang bertujuan untuk pemerataan mutu pendidikan yang bisa menghapuskan istilah sekolah sekolah unggulan. Adanya sistem zonasi ini mampu menciptakan pemerataan, peserta didik yang berprestasi tidak berkumpul di sekolah unggul saja karena mau tidak mau mereka harus mendaftar di sekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh yang berlabel sekolah favorit. Radius zona terdekat diterapkan oleh pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan kondisi setempat.

b. Penyebab Permasalahan Zonasi

Wahyuni (2024) menyebutkan bahwa sistem zonasi PPDB yang seharusnya menjadi solusi untuk masalah pemerataan pendidikan, justru menimbulkan berbagai persoalan baru. Persolan tersebut sebagai berikut:

1) Ketidakmerataan Sebaran Sekolah

Sistem zonasi ini menyebabkan banyak daerah masih mengalami ketidakmerataan dalam jumlah dan kualitas sekolah negeri. Banyak sekolah yang berkumpul di satu wilayah, sehingga siswa yang tinggal jauh dari pusat keramaian kesulitan masuk sekolah.

2) Sebaran Jumlah Guru Belum Merata

Ketidakmerataan jumlah guru dan failitas sekolah yang menyebabkan kualitas pendidikan tidak sama disetiap wilayah. Hal ini memunculkan istilah sekolah favorit dan no-favorit. Banyak orang tua yang melanggar aturan zonasi demi menyekolahkan anaknya di sekolah favorit, meskipun jumlah

siswanya sudah melebihi kapasitas. Disisi lain ada sekolah kekurangan siswa.

3) Penafsiran dan Pelaksanaan Aturan yang Beragam

Aturan zonasi dalam PPDB yang tercantum dalam permendikbud seringkali ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap daerah. Perbedaan kondisi geografi, sosial dan ekonomi menjadi faktor utama penyebabnya.

4) Penentuan Jarak Tempat Tinggal

Menggunakan jarak rumah ke sekolah sebagai syarat utama untuk masuk ke sekolah itu sulit karena pembagian sekolah dan jumlah penduduk tidak merata. Akibatnya, banyak yang melanggar aturan, seperti memalsukan alamat atau menjual kursi sekolah.

5) Minimnya Sosialisasi dan Pengawasan

Kurangnya sosialisasi dan pengawasan membuat pelaksanaan PPDB zonasi di daerah seringkali tidak berjalan sesuai aturan. Akibatnya, banyak pelanggaran terjadi karena masyarakat kurang memahami aturan dan tidak ada pengawasan yang efektif.

c. Tujuan Sistem Zonasi

Zidane, (2023) mengungkapkan bahwa Tujuan dari Implementasi kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan peserta didik baru adalah untuk menjalankan amanat pemerintah dalam hal ini yaitu mendukung pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan sekaligus menjadi wadah yang mampu memberikan pelayanan pendidikan dengan mutu terbaik kepada para calon peserta didik di wilayah zona agar menghasilkan output yang berkualitas. Hal itu sejalan sebagaimana tercantum dalam Panduan PPDB zonasi tahun 2021 yaitu:

- 1) Sistem zonasi memiliki tujuan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan mengakses pendidikan.

2) sistem untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan pendidikan.

Lebih lanjut, Mendikbud Muhadjir Effendy dalam Zidane, (2023) yang mana secara garis besar, menjabarkan tujuan diberlakukannya sistem zonasi adalah untuk beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Menjamin pemerataan akses layanan pendidikan
- 2) Mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga
- 3) Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah

Selain itu Perdana, (2019) juga mengungkapkan bahwa tujuan utama dari kebijakan sistem zonasi PPDB ini adalah untuk menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik. Juga dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi pendidikan sehingga kualitas pendidikan mampu untuk disamaratakan

d. Ketentuan Sistem Zonasi

Implementasi sistem zonasi dalam sistem sistem pendidikan PPDB, pada awalnya dimatifikasi oleh asumsi berbasis kasta pada sekolah negeri. Sistem zonasi ini kemudian diperkenalkan untuk menghapus kasta di sekolah. Rindang, (2023) menyebutkan Ketentuan-ketentuan dalam sistem zonasi PPDB sebagai berikut:

- 1) Jalur zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah.
- 2) Jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah.
- 3) Jalur perpindahan tugas orang tua paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.
- 4) Kuota 30% yang sisa pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi
- 5) Ketentuan zonasi dikecualikan untuk SMA, satuan pendidikan kerja sama, sekolah Indonesia di luar negeri sekolah yang

menyelenggarakan pendidikan khusus, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, sekolah berasrama, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dan sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar.

- 6) Surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh ketua RT yang telah dilegalisir terlebih dahulu oleh kepala desa, yang berisi mengenai keterangan bahwa siswa yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat satu tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili tersebut.
- 7) Penetapan wilayah zonasi harus memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran tempat tinggal calon siswa baru, dan kuota sekolah yang disesuaikan dengan tersedianya jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah yang bersangkutan.

Kebijakan sistem zonasi yang diterapkan sejak tahun 2017 menjadi pendekatan baru yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pada akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Rindang (2023) juga menyebutkan bahwa ada beberapa perubahan aturan zonasi dalam PPDB 2021 dari peraturan zonasi tahun 2019 yakni:

- 1) Perubahan batas umur calon peserta didik jenjang SD (7 Tahun) dan persentase jalur zonasi jenjang SD minimal 70%.
- 2) Pemda dapat melibatkan sekolah swasta dalam PPDB
- 3) Perpindahan kuota penyandang disabilitas ke jalur afirmasi.
- 4) KK menjadi syarat utama dan penggunaan surat keterangan domisili harus memenuhi syarat keadaan tertentu (bencana alam atau bencana sosial).
- 5) Jalur prestasi SMP, SMA dan seleksi SMK yang sebelumnya menggunakan nilai UN diganti dengan rapor yang dilampirkan surat keterangan peringkat nilai rapor dari sekolah asal.

- 6) Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua.
- 7) Seleksi jenjang SMK memprioritaskan keluarga ekonomi tidak mampu dan atau anak penyandang disabilitas minimal 15% dan SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah minimal 10%.
- 8) Jika daya tampung sekolah pada wilayah zonasi peserta tidak tersedia maka peserta bisa disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi terdekat.

Pembagian zonasi diserahkan kepada Pemerintah Daerah (pemda) setempat. Klasifikasi zonasi per sekolah bisa didasarkan pada kelurahan domisili pendaftaran atau jarak tempuh per kilometer dari rumah ke sekolah.

e. Dampak Kebijakan

1) Pengertian Dampak

Dampak merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaruh dari suatu tindakan, keputusan atau peristiwa. Zakaria, (2022) mengemukakan bahwa dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Satria, (2019) mengemukakan bahwa dampak memberikan pengaruh berupa:

- a) Dampak positif yaitu dampak yang berpengaruh positif
- b) Dampak negatif yaitu dampak yang berpengaruh negatif

- c) Dampak langsung yaitu dampak yang dirasakan langsung dan berkaitan dengan dampak positif
- d) Dampak tidak langsung yaitu dampak tidak langsung yang dirasakan dengan adanya suatu pengaruh

Menurut Waralah Rd Cristo dalam Hariyati (2015) Dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.

Menurut Irfan Islamy dalam Malimbe (2021) dampak adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan.

Jadi, menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dampak adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau sekelompok orang yang akan mendatangkan akibat dari tindakan atau dilaksanakannya suatu kebijakan baik negatif maupun positif.

2) Dampak Positif dan Negatif Sistem Zonasi PPDB

Penerapan sistem zonasi telah memicu beragam tanggapan, baik positif maupun negatif dari berbagai stakeholder pendidikan, termasuk sekolah, peserta didik dan orang tua peserta didik. Ula dan Lestari dalam Selvia, (2022) menyebutkan bahwasanya sistem zonasi memberikan imbas positif bagi masyarakat yaitu seperti :

- a) Dianggap memudahkan orang tua dalam memilih sekolah lanjutan untuk anak-anak mereka

Bagi sebagian calon wali murid dengan adanya penerapan sistem zonasi ini memberikan kemudahan bagi para orangtua atau wali murid mencari sekolah lanjutan bagi anak-anaknya karena tidak perlu lagi memikirkan hasil Ujian Nasional yang didapatkan oleh sang anak. Anak dengan nilai tinggi masih memiliki peluang masuk sekolah

favorit yang sesuai, sedangkan anak dengan nilai rendah mungkin menghadapi kesulitan. Namun, secara keseluruhan, sistem zonasi membantu mengurangi kesulitan orang tua dalam mencari sekolah lanjutan untuk anak-anak mereka.

- b) Memberikan keuntungan bagi orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka.

Sistem zonasi mengacu pada jarak antara sekolah dan rumah siswa daripada nilai prestasi siswa. Sesuai dengan jabaran di atas, melihat keadaan dan kondisi para peserta didik pada jenjang pendidikan SMP masih banyak yang labil. Dengan demikian, kondisi yang demikian memberikan manfaat bagi orang tua dalam mengawasi tingkah laku anaknya. Karena itu, pengawasan orang tua sangat penting, dan sistem zonasi membantu peran orang tua.

- c) Membantu mengurangi biaya transportasi dan menghemat jarak tempuh ke sekolah

Kebijakan sistem zonasi sangat bagus untuk diterapkan karena memberi kemudahan bagi siswa untuk pergi ke sekolah karena mereka dapat pergi ke sekolah yang lebih dekat dan menghemat uang untuk transportasi.

Tidak dapat dipungkiri, selain mendapat respon positif namun juga sistem zonasi ini menimbulkan respon negatif dari berbagai kalangan. Cahyani (2020), menyampaikan bahwasanya kebijakan sistem zonasi memberikan dampak dari 5 aspek yaitu :

- a) Dari Segi Efektivitas

Kebijakan zonasi sejauh ini belum dapat dianggap efektif untuk mencapai pemerataan kualitas pendidikan karena baru diterapkan pada tahun 2017 dan perlu dievaluasi.

b) Dari Segi Kecukupan

Sistem zonasi memiliki berbagai manfaat, namun manfaat tersebut lebih dirasakan oleh siswa yang tinggal dekat dengan sekolah. Sementara itu, siswa yang rumahnya berjarak jauh dari sekolah cenderung menghadapi kesulitan yang lebih besar.

c) Dari Segi Pemerataan

Sistem zonasi yang berlaku masih tidak merata karena tidak meratanya sarana dan prasarana di seluruh sekolah. Sistem zonasi akan berfungsi dengan baik jika disertai dengan pemerataan sarana dan prasarana untuk mendukung kualitas pendidikan. Dengan kata lain, keadaan sarana dan prasarana dianggap sangat penting untuk pemerataan kualitas sekolah.

d) Dari Segi Responsivitas

Kebijakan sistem zonasi banyak menuai kritik dari wali murid karena dianggap menimbulkan kekecewaan selama pelaksanaannya. Salah satu kasus yang dialami oleh wali murid adalah siswa yang memiliki jarak rumah dekat dengan sekolah sekitar 300 meter dan siswa dengan jarak rumah lebih dari 1 km. Namun, ketika keluhan ini dilaporkan kepada dinas pendidikan, tidak ada tindakan yang diambil untuk menangani keluhan wali murid. Ini merupakan salah satu tanggapan negatif dari wali murid.

e) Dari Segi Ketetapan

Sistem zonasi masih belum mencapai sasarannya karena pemerintah belum siap untuk menyediakan sarana dan prasarana serta persebaran sekolah yang tidak merata. Namun, ada beberapa manfaat dari sistem zonasi, seperti mengurangi biaya transportasi yang dikeluarkan siswa untuk pergi ke sekolah.

Widya Astuti dalam Selvia, (2022), membagi dimensi ketetapan menjadi 4 bagian yaitu:

- a) Ketetapan kebijakan, dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi proses perumusan kebijakan tanpa mempertimbangkan pemetaan wilayah yang padat penduduk serta tidak adanya standarisasi pendidikan pada seluruh sekolah yang mengarahi kepada upaya menghapuskan sekolah favorit dan non-favorit.
- b) Ketetapan pelaksanaan, pada saat penerapan sistem zonasi untuk menerima siswa baru yang menggunakan Kartu Keluarga (KK) sebagai alat untuk menentukan jarak yang bebas dari pengawasan panitia. Banyak kali terjadi pemalsuan identitas alamat peserta didik dengan menggabungkan data dari KK asli ke KK yang dianggap lebih dekat dengan sekolah. Selain tidak berada di bawah pengawasan panitia, hal ini juga gagal memverifikasi data asli ke lapangan.
- c) Ketetapan sasaran, Karena banyak sekolah masih tidak memenuhi pagu peserta didik, yang dapat menyebabkan praktik jual-beli kursi, tujuan dari penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru masih tidak jelas.
- d) Ketetapan lingkungan, dalam penerapannya banyak misunderstanding antar perumusan kebijakan dengan para implementor pada tingkat bawah, sehingga tidak sedikit banyak wali murid mengalami kebingungan dalam melaksanakan sistem zonasi.

Menurut Marsanda (2022) dampak kebijakan positif dan negatif dalam PPDB diantaranya:

1). Dampak Positif

- a) kebijakan sistem zonasi memberikan kemudahan terhadap akses layanan pendidikan.

- b) kebijakan sistem zonasi dapat pemeratakan kualitas sekolah
- c) kebijakan sistem zonasi dapat memberikan kesempatan sekolah memperoleh input siswa yang memiliki potensi unggul
- d) kebijakan sistem zonasi dapat meminimalisir adanya persaingan sekolah
- e) kebijakan sistem zonasi meminimalisir siswa yang terlambat
- f) kebijakan sistem zonasi dapat memberikan kemudahan peserta didik dan orang tua dalam mengakses pendidikan
- g) kebijakan sistem zonasi dapat meningkatkan kualitas dan prestasi peserta didik

2). Dampak Negatif

- a) Penerapan kebijakan sistem zonasi dapat memberikan dampak terhadap penurunan jumlah peserta didik
- b) Kebijakan sistem zonasi dapat menurunkan kualitas sekolah
- c) Kebijakan sistem zonasi dapat menurunkan prestasi sekolah
- d) Diberlakukannya kebijakan sistem zonasi dapat membuat peserta didik kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai minat dan keinginannya
- e) Kebijakan sistem zonasi dapat mengurangi motivasi peserta didik untuk belajar
- f) Dengan diberlakukannya kebijakan sistem zonasi membuat peserta didik yang mendapatkan nilai Ujian Nasional tinggi tidak bisa mendaftar di sekolah impian yang berada di luar zona lingkungannya

- g) Kebijakan sistem zonasi membatasi kebebasan peserta didik dalam memilih sekolah yang mereka inginkan.

Menurut Risna et al., (2020) kebijakan publik baik yang diharapkan mampu menjadi solusi efektif bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Akan tetapi, proses implementasi kebijakan seringkali menemui tantangan yang dapat menghasilkan konsekuensi yang beragam, baik yang bersifat positif maupun negatif.

1). Dampak Positif

- a) Dengan kebijakan sekolah sistem zonasi ini, siswa dapat mendaftar di sekolah yang lebih dekat dengan rumah mereka. Ini memungkinkan siswa menggunakan angkot atau sepeda untuk pergi ke sekolah tanpa mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk transportasi. Karena sekolahnya dekat dengan rumah dan rawan macet, siswa diharapkan tidak terlambat ke sekolah. Ini akan memastikan mereka tetap segar ketika tiba di kelas. Sistem zonasi sekolah membantu siswa menghemat waktu, menghilangkan keteteran. Karena lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah, orang tua dan siswa merasa lebih mudah untuk mengawasi anak-anaknya saat mereka pergi ke sekolah. Siswa juga semakin terlibat dalam aktivitas ekstrakurikuler.
- b) Dianggap dapat meningkatkan prestasi akademik siswa dengan menerapkan kebijakan sekolah di lingkungan rumah karena tingkat gangguan dari lingkungan luar berkurang, yang dianggap dapat memengaruhi prestasi akademik mereka. Sistem zonasi ini dapat memberikan ruang bagi orang tua untuk mengawasi anak mereka setelah pelajaran di sekolah selesai.

- c) Dengan sistem zonasi sekolah ini, pemerintah pasti akan memberikan pemerataan kualitas guru dan perbaikan sarana prasarana, sehingga fasilitas sekolah akan sama, guru favorit akan dirotasi ke sekolah pinggiran, dan kepala sekolah akan menjadi adil. Orang tua dan siswa tidak lagi perlu khawatir.

Mampu mengurangi persepsi sekolah favorit karena kebijakan sekolah sistem zonasi ini bertujuan untuk menghilangkan "Kastanisasi" di antara sekolah, yang dapat mengubah sikap mental dan persepsi masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai sekolah favorit dan sekolah non-favorit.

1). Dampak negatif

Selain dampak positif ada juga dampak negatif yang dirasakan oleh calon siswa-siswi dan juga orangtua mereka mengenai adanya kebijakan pendidikan ini, tidak sedikit diantara mereka yang beranggapan bahwa kebijakan sekolah sistem zonasi ini dapat membatasi siswa untuk mengenyam pendidikan. Siswa tidak bisa bersekolah di sekolah impiannya karena terhalang oleh ketentuan zonasi yang salah satunya adalah jarak tempat tinggal yang diluar batas zonasi. Dampak buruk lainnya yang dirasakan oleh siswa dan orangtua antara lain:

- a) Masyarakat menganggap pihak sekolah tidak adil, dan kebijakan sistem zonasi menyebabkan masalah baru. Hal ini terjadi karena banyak siswa yang mendaftar di sekolah yang sama, memiliki nilai ujian nasional yang berbeda, dan tinggal di dekat satu sama lain. Namun, satu siswa, meskipun memiliki nilai ujian nasional yang lebih rendah dari rekan-rekannya, diterima saat pengumuman. Hal ini menyebabkan orang tua dan

siswa kecemburuan sosial karena tidak diterima di sekolah.

- b) Efek negatif dari kebijakan ini yang dirasakan oleh masyarakat adalah bahwa dorongan untuk belajar yang lebih baik telah hilang. Selain itu, siswa membutuhkan lingkungan baru di mana mereka dapat bersosialisasi lebih luas untuk meningkatkan pertumbuhan mereka dan memperluas wawasan mereka. Ketika anak belajar, lingkungannya sangat mempengaruhi perkembangan mereka. Siswa mungkin tidak terpacu untuk belajar hal baru jika mereka tinggal di lingkungan yang sama dari SD hingga SMA. Selain itu, siswa membutuhkan keberagaman untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak dan beragam.
- c) Kebijakan sistem zonasi sekolah ini menekankan pada jarak antara sekolah dan rumah. Namun, banyak siswa yang berada di zona yang sama yang tidak diterima. Akibatnya, banyak orangtua yang kecewa karena anaknya tidak diterima di sekolah yang mereka inginkan. Mereka juga semakin kecewa karena pihak sekolah menggunakan aplikasi jarak yang lebih banyak, yang selalu diletakkan. Akibatnya, banyak murid yang tidak dapat lolos karena jarak rumah mereka dengan sekolah menjadi terlalu jauh. Ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka harus tergeser dari siswa lain yang telah dipilih dan berhasil masuk ke sekolah itu. Sistem zonasi tidak memperhitungkan kepadatan penduduk, jumlah siswa yang lulus sekolah, dan keinginan siswa untuk melanjutkan sekolah.

- d) Efek negatif lainnya terjadi pada siswa yang memiliki nilai UN yang tinggi dan mendaftar ke sekolah yang menjadi tujuannya, mereka kalah dari siswa lain yang memiliki nilai UN yang lebih rendah tetapi dapat masuk ke sekolah yang diinginkan hanya dengan jarak rumah yang lebih dekat. Hal ini menyebabkan sistem zonasi ini dianggap tidak adil karena orang-orang dengan nilai yang tinggi merasa tidak dihargai. Orangtua siswa ragu untuk mengambil langkah lain dalam mendaftarkan anaknya karena pembangunan sekolah negeri belum selesai dan tidak memiliki fasilitas dan infastruktur yang memadai. Tidak meratanya sosialisasi PPDB sistem zonasi menyebabkan banyak orangtua bersemangat untuk mendaftar ke sekolah favorit mereka meskipun jarak tempat tinggal mereka cukup jauh. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah belum sepenuhnya bekerja sama dengan seluruh sekolah di daerah untuk meningkatkan fasilitas pendidikan secara merata. Akibatnya, masyarakat terus mengabaikan sekolah pinggiran, yang selama ini dianggap sebagai sekolah yang tidak disukai dan memiliki kualitas yang buruk, membuat mereka kekurangan siswa.

Selain itu Implementasi sistem zonasi ini juga berdampak bagi para guru di sekolah, baik pada dampak positif maupun dampak negatif.

1). Dampak Positifnya

- a) lebih banyak siswa yang aktif di praktik daripada teori (dianggap menguntungkan bagi guru-guru tertentu);
- b) Sebagian guru mengambil hikmah positif dari adanya kebijakan zonasi ini menyatakan bahwa, dengan

semakin banyaknya siswa yang sulit memahami dan sulit menyerap materi ini, mengharuskan seorang guru untuk dapat menciptakan metode pembelajaran baru dengan harapan dapat meningkatkan nilai siswa dibawah KKM;

- c) Lebih banyak siswa yang semangat dan termotivasi pada kegiatan outdoor saja (sekali lagi, hanya dianggap menguntungkan bagi sebagian guru/ Mata pelajaran tertentu).

2). Dampak Negatif

Dampak negatif bagi sekolah dan guru akibat implementasi sistem zonasi antara lain yaitu:

- a) Sebagian guru mengeluh siswa banyak memperoleh nilai di bawah KKM (terutama mata pelajaran yang terlalu banyak teori)
- b) Semakin banyak pula terjadi pelanggaran tata tertib seperti membolos, terlambat, berkelahi, tidak mengenakan atribut lengkap dan lain-lain
- c) Dirasa lebih sulit untuk dibimbing
- d) Memunculkan pelanggaran-pelanggaran baru yang belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya
- e) Daya juang siswa rendah sehingga banyak siswa zonasi yang meremehkan guru misalnya menunda-nunda tugas yang diberikan
- f) Kurang memiliki sopan santun terhadap guru
- g) guru merasa kesulitan mengondisikan kelas terutama guru yang sudah sepuh
- h) Terbentuknya geng-geng negatif, warisan dari sekolah pada jenjang pendidikan sebelumnya
- i) Terjadi banyak perkelahian di luar sekolah karena sudah paham seluk beluk lingkungan

- j) Kebiasaan kurang baik di rumah di bawa ke sekolah
- k) Pihak sekolah hampir setiap hari mendapat laporan tentang pelanggaran siswa
- l) Pengawasan orang tua belum efektif meskipun jarak sekoah dekat
- m) Prestasi sekolah menurun.

Kemudian adapun dampak positif dan negatif yang dirasakan masyarakat dari diberlakukannya sistem zonasi. Dampak tersebut sebagai berikut:

1). Dampak Positifnya

- a) Semakin berkurang kemacetan yang ditimbulkan di lingkungan sekolah, meskipun tidak signifikan
- b) Peserta didik bertempat tinggal dekat dengan sekolah sehingga dapat memangkas biaya transportasi siswa
- c) Persyaratannya sangat mudah jika ingin menyekolahkan anaknya melalui jalur zonasi keluarga kurang mampu bisa menyekolahkan anaknya disekolah favorit secara gratis
- d) Ada kebanggaan tersendiri bagi orangtua yang berhasil menyekolahkan putra-putrinya di sekolah favorit yang diinginkan.

2). Dampak Negatif

- a) dirasa kurang adil bagi siswa yang memiliki prestasi karena akan lebih sulit dapat masuk di sekolah yang dicita-citakannya
- b) daya juang siswa menurun karena untuk masuk sekolah favorit tidak perlu nilai bagus
- c) harga rumah disekitar sekolah menjadi jauh lebih mahal, dan banyak orang memburu rumah dekat dengan sekolah favorit

- d) adanya manipulasi tempat tinggal oleh oknum wali siswa agar anaknya dapat sekolah di sekolah favorit
- e) belum di imbangi dengan pemerataan jumlah sekolah negeri dan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga memunculkan blank spot di beberapa wilayah kecamatan
- f) konsep sekolah favorit dan non favorit tidak hilang dari pandangan masyarakat terbukti banyak kasus perubahan dan manipulasi KK (Kartu Keluarga)
- g) konsep penerapan sistem zonasi yang kurang jelas, sehingga ada beberapa wali murid yang mengeluhkan jarak ke sekolah masih jauh meskipun melauai jalur zonasi padahal ada sekolah yang lebih dekat
- h) Dirasa menghilangkan hak anak untuk memilih sekolah yang di inginkan terbukti dari adanya laporan beberapa wali murid ke KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

Terkait dengan masalah pada penelitian ini maka dampak pada penelitian ini adalah suatu perubahan yang terjadi akibat dari penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi di SMP Negeri 3 Batusangkar. Dengan adanya dampak, maka dapat dilihat perbandingan antara sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi di SMP Negeri 3 Batusangkar sebagai sekolah unggul dengan akreditasi A, apakah kebijakan tersebut menimbulkan dampak positif atau negatif.

f. Penerimaan Peserta Ddidik Baru (PPDB)

1). Pengertian penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Salah satu kegiatan dalam manajemen peserta didik yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dalam Ashari (2017) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu

kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru.

Penerimaan Peserta Didik dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya penerimaan peserta didik yang dikelola secara profesional akan memberikan keuntungan sekolah dalam bidang pendaftaran yang nantinya akan menjadi peserta didik pada lembaga pendidikan tersebut. Dengan adanya peserta didik yang masuk menjadi peserta didik baru secara otomatis operasional sekolah akan memberikan keuntungan, dan proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan akan berjalan dengan lancar, karena pembelajaran merupakan satu kesatuan antara peserta didik dan tenaga pendidik.

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan secara *online* atau berbasis internet. Dalam Utami (2018) mengatakan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan siswa baru (PSB), mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara *online* dan berbasis waktu nyata (*realtime*), yang bertujuan secara umum adalah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, menciptakan sistem penerimaan siswa baru yang terintegrasi, akurat dan transparan, melaksanakan penerimaan siswa baru dengan lebih praktis dan efisien, menyediakan basis data sekolah.

2). Tahapan dan Persyaratan PPDB

Tahun ajaran baru akan segera dimulai, bagi calon peserta didik baru yang hendak meneruskan pendidikan ke jenjang SMP dalam Admin SMP ditsmp.kemdikbud (2021) ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

a) Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan SMP negeri dilaksanakan oleh sekolah paling lambat minggu pertama bulan Mei dengan memuat informasi seperti persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya, tanggal pendaftaran, jalur pendaftaran, jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 7 (tujuh) sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik, dan tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi.

b) Tahapan selanjutnya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pendaftaran

Tahap pendaftaran dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan (laman PPDB yang dikelola Pemda masing-masing daerah). Bila fasilitas jaringan tidak memadai, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotocopy dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

c) Setelah melakukan pendaftaran, tahap selanjutnya yaitu melakukan seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran

Calon peserta didik untuk jenjang SMP berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat. Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan. Jika terdapat calon peserta didik yang jarak tempat tinggal dengan sekolahnya sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

- d) Setelah melakukan seleksi tahap selanjutnya pengumuman penetapan peserta didik baru.

Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB. Proses penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

- e) Tahap selanjutnya daftar ulang

Dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

3. Akses Pendidikan

a. Pengertian Akses Pendidikan

Akses pendidikan merujuk pada kemampuan semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, geografis, atau gender, untuk mendapatkan kesempatan belajar dan mengembangkan potensi mereka melalui sistem pendidikan yang tersedia. Menurut Perdana dalam Novrian, (2019) akses pendidikan adalah kemudahan yang diberikan kepada setiap warga masyarakat untuk menggunakan kesempatannya dalam memasuki suatu program pendidikan.

b. Aspek Akses Pendidikan

Menurut Perdana dalam Novrian, (2019) menyebutkan bahwa Akses tersebut dapat berupa sikap sosial yang nondiskriminatif, kebijakan politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mendukung dan mencegah diskriminasi, tersedianya lingkungan fisik pendidikan yang aksesibel, tersedianya alat bantu belajar/mengajar yang sesuai, dan biaya pendidikan yang terjangkau, yang memungkinkan setiap warga masyarakat

menggunakan kesempatannya untuk mengikuti proses belajar/mengajar pada program pendidikan yang dipilihnya. Menurut Suryaningrum, (2024) mengemukakan aspek utama terkait dengan akses pendidikan:

1) Ketimpangan Akses di Daerah Terpencil

Banyak daerah terpencil yang masih menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan akses pendidikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur, seperti sekolah, jalan, dan transportasi yang memadai, serta keterbatasan jumlah guru.

2) Masalah Infrastruktur Sekolah

Infrastruktur yang buruk, seperti gedung sekolah yang tidak layak, kurangnya fasilitas sanitasi, dan minimnya akses ke teknologi, menghambat proses pembelajaran. Siswa di sanitasi, dan minimnya akses teknologi, menghambat proses pembelajaran.

3) Biaya Pendidikan Tinggi

Biaya pendidikan tinggi, baik untuk pendidikan dasar maupun tinggi, menjadi penghalang utama bagi banyak keluarga. Ini mencakup biaya buku, seragam, transportasi, dan biaya lainnya yang mungkin tidak terjangkau oleh keluarga berpenghasilan rendah.

4. Kualitas Pendidikan

a. Pengertian Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan sesuatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Pendidikan menjadikan generasi ini sebagai sosok panutan dari pengajaran generasi yang terdahulu. Sampai sekarang ini, pendidikan tidak mempunyai batasan untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap karena sifatnya yang kompleks seperti sarannya yaitu manusia. Sifatnya yang

kompleks itu sering disebut ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan kelanjutan dari pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Menurut Depdiknas dalam Sri Yustikia, (2019) menjelaskan bahwa Kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan pelanggan yang diharapkan atau tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia untuk berlangsungnya proses pendidikan. Input pendidikan dapat berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan – harapan sebagai pemandu berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya termasuk sarana prasarana pendidikan. Tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input.

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan hasil dari proses pendidikan disebut output pendidikan. Dalam pendidikan berskala mikro (sekolah) yang dimaksud dengan proses adalah pengambilan keputusan, pengelolaankelembagaan, pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi. Proses pendidikan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah dilakukan secara

harmonis, mampu mendorong motivasi dan minat belajar dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.

Output pendidikan merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah presentasi sekolah. Perilaku sekolah dapat diukur kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Output sekolah dikatakan berkualitas tinggi apabila presentasi sekolah khususnya prestasi belajar siswa menunjukkan pencapaian tinggi apabila presentasi belajar siswa dapat berupa presentasi akademik dan non akademik. Prestasi akademik berupa nilai ulangan umum, ujian sekolah, ujian nasional kualitas karya ilmiah, dan lomba-lomba akademik; sedangkan prestasi non akademik berupa ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, kesopanan, kecakapan olah raga, kemampuan berkesenian, keterampilan dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

b. Faktor Rendahnya Kualitas Pendidikan

Elvira, (2021) menyebutkan rendahnya kualitas pendidikan Indonesia sebagai berikut:

1) Rendahnya Kualitas Sarana Fisik

Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya sekolah ataupun gedung perguruan tinggi yang mengalami kerusakan parah, ketersediaan media pembelajaran yang rendah, laboratorium yang tidak standar, dan masih banyak lagi. Bahkan masih ada sekolah yang tidak memiliki gedung, tidak mempunyai perpustakaan, tidak memiliki laboratorium, dan sarana lainnya.

2) Rendahnya Kualitas Guru

Kebanyakan guru di Indonesia belum profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu Guru bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

3) Rendahnya Prestasi Siswa

Pencapaian prestasi siswa belum memuaskan. Hal ini disebabkan antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran yang terjadi hampir di semua sekolah yang ada di Indonesia. Masih rendahnya prestasi siswa ini bisa dilihat dari hasil pencapaian prestasi siswa Indonesia di dunia internasional yang masih sangat rendah.

- 4) Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan dari peserta didik masih terbatas pada tingkat pendidikan dasar.
- 5) Relevansi pendidikan dengan kebutuhan masih rendah Hal ini ditunjukkan dengan adanya kenyataan, masih banyaknya lulusan yang menganggur.

Menurut Andi dalam Larasati, (2022) mengemukakan penyebab rendahnya kualitas di Indonesia yaitu:

1) Efektifitas Pendidikan di Indonesia Pendidikan

Keberhasilan pendidikan dapat dinilai dari seberapa lancarnya peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara menyenangkan dan efektif, serta mencapai tujuan yang diharapkan. Sayangnya, salah satu alasan kurangnya kesuksesan pendidikan di Indonesia adalah ketidakjelasan tujuan pembelajaran sebelum proses pembelajaran dimulai. Ini menunjukkan bahwa kurangnya struktur dalam perencanaan pembelajaran dapat menghambat proses pengajaran dan pembelajaran.

Pendekatan yang melihat pendidikan formal hanya sebagai formalitas untuk mencapai jenjang tinggi sering kali menjadi kendala. Pandangan ini memandang bahwa menyelesaikan pendidikan formal sudah cukup, tanpa

memperhatikan sejauh mana peserta didik benar-benar memahami dan mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Gagasan bahwa lulus dari pendidikan tinggi sudah cukup untuk dianggap "hebat" oleh masyarakat dapat mengabaikan esensi pendidikan sebagai sarana pengembangan diri dan peningkatan kapasitas.

Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa efektivitas pengajaran tidak hanya ditentukan oleh capaian formal akademis semata. Pembelajaran yang benar-benar efektif harus mampu merangsang minat, memotivasi, dan mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma yang menekankan pada tujuan pembelajaran yang jelas, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi pemahaman mereka, serta menilai prestasi bukan hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas. Mengubah persepsi terhadap pendidikan formal menjadi suatu proses yang mendorong pemahaman, kreativitas, dan aplikasi pengetahuan dapat meningkatkan efektivitas pengajaran di Indonesia. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi wahana yang lebih efisien dalam mengembangkan potensi peserta didik dan memberikan kontribusi nyata pada kemajuan bangsa.

2) Efisiensi Pengajaran di Indonesia

Efisiensi dalam konteks pendidikan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai efektivitas suatu tujuan dengan menggunakan proses yang lebih ekonomis atau 'murah'. Namun, dalam realitas pendidikan di Indonesia, seringkali fokus hanya tertuju pada hasil akhir yang sesuai dengan standar, tanpa memperhatikan secara mendalam proses pendidikan itu sendiri. Hal ini menciptakan tantangan efisiensi yang signifikan dalam sistem pendidikan tanah air.

Salah satu permasalahan utama terkait efisiensi pengajaran di Indonesia adalah tingginya biaya pendidikan. Biaya yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata dan menyeluruh, serta dapat membatasi partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan juga menjadi faktor krusial yang mempengaruhi efisiensi. Pembelajaran yang terlalu lama atau tidak terstruktur dengan baik dapat menghambat kemampuan siswa untuk memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dengan efektif.

Mutu pendidik juga menjadi aspek penting dalam efisiensi pengajaran. Kurangnya kualitas pendidik dapat menghambat kemampuan mereka dalam mentransfer pengetahuan dengan efektif kepada siswa. Oleh karena itu, perlu fokus pada peningkatan mutu pendidik sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan efisiensi sistem pendidikan. Semua permasalahan efisiensi tersebut juga berdampak pada peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih efisien dan efektif, yang pada gilirannya akan mendukung perkembangan sumber daya manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kembali pendekatan dan strategi dalam proses pendidikan agar dapat mencapai efisiensi yang lebih optimal demi kesejahteraan dan kemajuan pendidikan di Indonesia.

3) Standardisasi Pendidikan di Indonesia

Peserta didik Indonesia seringkali cenderung berfokus pada pencapaian standar pendidikan, tanpa memperhatikan sejauh mana pendidikan yang diambil dapat efektif dan praktis dalam penerapan. Prioritas utama tampaknya hanya tertuju pada

bagaimana mencapai standar nilai atau hasil tertentu, tanpa mempertimbangkan metode pembelajaran yang efektif dan aplikatif. Dalam konteks ini, yang menjadi fokus utama adalah memenuhi nilai di atas standar, tanpa memperhatikan aspek esensial dari proses pendidikan yang dapat membentuk pemahaman dan keterampilan yang lebih mendalam.

B. Penelitian yang relevan

Penelitian yang relevan tidak ada yang membahas kedua variabel yang penulis teliti. Ada yang meneliti, namun yang sama hanya satu variabel saja, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti (2020) yang berjudul “*Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik*”. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari pemberlakuan sistem zonasi bagi peserta didik maupun mutu pendidikan. proses pengumpulan data dengan menggunakan Triangulasi Data yaitu dengan mengumpulkan beragam sumber yang berbeda namun menggunakan metode yang sama dengan penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Zonasi dapat pemeratakan pendidikan 2). Masih terjadi penyimpangan dari beberapa oknum baik dari orangtua maupun sekolah 3). Zonasi berpengaruh terhadap diri peserta didik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang dampak pemberlakuan sistem zonasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada lokasi yang akan dijadikan penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Madiana (2022) yang berjudul “*Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya Terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan*”. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan asas pemerataan pendidikan dan dapat memberikan hak untuk semua kalangan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem zonasi di SMA Negeri 1 P, SMA Negeri 2 P, SMA Negeri 1 K. Sistem Zonasi masih mengikuti aturan permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, afirmasi, prestasi, dan perpindahan domisili orang tua, namun jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir menggunakan jalur afirmasi. Seharusnya kriteria kedua yang lebih relevan setelah jarak adalah prestasi siswa. Kriteria prestasi akan lebih bagus karena lebih menguntungkan sekolah. Dengan adanya sistem zonasi siswa lebih besar kemungkinan untuk masuk SMA Negeri, kemudian dampak negatif dari sistem zonasi pembelajaran di kelas kurang efektif dan dampak positifnya yaitu zonasi tidak lagi memandang status sosial.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang kebijakan sistem zonasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di SMA sedangkan, penelitian yang peneliti lakukan di SMP

3. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Wulandari (2018) yang berjudul "*Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa*". Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun 2017/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif atau signifikan dengan kategori keeratan tinggi antara penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang PPDB sistem zonasi. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada lokasi dan metode penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ula & Lestari (2020) yang berjudul “*Dampak Sistem Zonasi bagi Sekolah Menengah Pertama*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan fakta di sekolah terkait dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan sistem zonasi tahun 2019 di Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di SMPN 8 Kota Malang. Pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan *deep interview* kepada 20 orang Guru dan 50 Responden dari masyarakat. Hasil penelitian ini meliputi dampak positif dan negatif dari pelaksanaan PPDB sistem zonasi 2019, pertama, dampak positif yang dirasakan oleh sekolah dan guru sebanyak 21% saja, dan sisanya 79% merasakan dampak negatif. Kedua, dampak positif yang dirasakan masyarakat hanya mencapai 36% dan lebih banyak merasakan dampak negatif sebesar 64%.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti dampak dari sistem zonasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada lokasi yang berbeda.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Syusilayarni (2021) yang berjudul “*Analisis Penerapan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMP Negeri Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan, faktor-faktor yang menjadi penghambat, dampak atas kebijakan pemerintah terhadap proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di SMPN Kecamatan Siak Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode

penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang dampak dari PPDB sistem zonasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu perbedaan lokasi penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti pakai yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan suatu eksplorasi terhadap "sistem yang terikat" atau "satu maupun beberapa kasus" yang dikaji dalam rentang waktu tertentu melalui pengumpulan data secara mendalam. Pendekatan ini melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks tertentu. Sistem terikat tersebut dibatasi oleh aspek waktu dan tempat, sementara kasus yang dikaji dapat berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu (Assyakurrohim et al., 2022).

Menurut Denzin dan Lincoln dalam (Anggito, 2018: 27) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Selain menurut Denzin dan Lincoln, dalam (Anggito, 2018: 27), Erickson juga mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif berusaha menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan dalam lingkungan alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Pendekatan ini melibatkan berbagai metode penelitian guna memperoleh pemahaman yang mendalam. Selain itu, penelitian kualitatif juga berupaya menggambarkan secara naratif aktivitas yang dilakukan serta dampaknya terhadap kehidupan.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 3 Batusangkar Jalan Sudirman-Lima Kaum, Batusangkar, Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat. Adapun alasan peneliti memilih lokasi di SMPN 3 Batusangkar adalah sesuai dengan keadaan yang diteliti dan juga

memiliki komunikasi yang baik dengan guru-guru di dalamnya. Penelitian ini mulai dilakukan November 2023 sampai Januari 2025.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2023	2024						2025	
		Nov	Jan	Feb	Mar	Apr	Nov	Des	jan	Feb
1	Observasi Awal	✓								
2	Penyusunan dan bimbingan proposal		✓	✓	✓					
3	Seminar proposal					✓				
4	Penelitian						✓			
5	Bimbingan skripsi						✓	✓	✓	
6	Sidang Munaqasah									✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berperan sebagai alat bantu utama dalam memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Tanpa instrumen yang memadai, proses pengumpulan data tidak dapat dilakukan secara optimal. Dalam penelitian kualitatif, peneliti itu sendiri berfungsi sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2014: 372). Untuk menjaga keaslian dan validitas data, peneliti didukung oleh alat bantu seperti perekam suara, alat tulis, serta dokumentasi. Oleh karena itu, keberadaan peneliti dalam penelitian kualitatif sangatlah penting, karena peneliti terlibat langsung dalam interaksi dengan lingkungan penelitian, baik dengan informan maupun pihak lain yang terkait.

D. Sumber Data

Sumber data yang peneliti pakai dalam pembahasan karya ilmiah ini yakni sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer (*Primary Data*) adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti

mengumpulkan data dengan melakukan wawancara di SMP Negeri 3 Batusangkar. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Sekolah, Guru, Wali Murid, serta Peserta Didik.

2. Sumber Data Sekunder (*Secondary Data*), yaitu data yang diperoleh dari segala bentuk seperti dokumen baik data tertulis maupun berupa foto. Data sekunder yang peneliti jadikan gambaran untuk penelitian ini yakni berupa laporan dan dokumen yang berhubungan dengan PPDB di SMP Negeri 3 Batusangkar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (Dua) cara yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat yang digunakan untuk memproduksi pemahaman situasi yang bersumber dari episode-episode interaksional khusus. Menurut Meleong dalam Ibrahim (2018: 88) wawancara merupakan pembicaraan dengan tujuan tertentu, yang melibatkan dua pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.

Melalui metode wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan yang terstruktur dan terbuka kepada narasumber seputar penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan terbuka mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Narasumber diundang untuk menyampaikan pendapat dan ide mereka sehingga penulis dapat menggali informasi lebih lanjut serta memperoleh sudut pandang yang beragam. Untuk memperoleh data atau informasi mengenai dampak kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMP Negeri 3 Batusangkar, wawancara dilakukan dengan Kepala Sekolah, Guru, Siswa serta Wali Murid.

2. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono dalam Ibrahim (2018: 94) adalah notasi kejadian yang telah berlalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau lukisan. Dokumen sumber informasi berbentuk bukan manusia baik foto maupun statistik.

Saat melakukan observasi dan wawancara, penulis menggunakan ponsel sebagai alat untuk dokumentasi, bersama dengan alat tulis lainnya untuk mencatat data. Metode dokumentasi, secara luas, mencakup setiap proses pembuktian yang didasarkan pada sumber apa pun, baik itu berupa informasi lisan, tertulis, maupun visual seperti gambar. Dokumentasi yang di dapat seperti fasilitas yang ada di sekolah berupa, Ruang guru, ruang kelas, musholla, lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Untuk mengefektifkan langkah analisis, Miles dan Huberman menyusun langkahnya yaitu: 1) reduksi data, 2) display data, 3) verifikasi dan 4) kesimpulan. Analisis ini dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh dan tuntas (Sugiyono, 2013: 246-253).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan peneliti pada penyederhanaan dan tranformasi data mentah atau kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat, diteliti, dan dirinci. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Merudiksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak

perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dengan mempermudah peneliti mengumpulkan data tentang dampak kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMP Negeri 3 Batusangkar.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *Phie Chard*, *oictogram* dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.

Pada tahap ini, penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dalam bentuk tabel, gambar, dan teks naratif. Bentuk teks naratif memungkinkan peneliti untuk memberikan penjelasan mengenai data yang diperoleh secara ringkas dan sederhana. Tujuan dari penyajian data ini untuk membantu peneliti dalam penarikan kesimpulan terhadap dampak kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMP Negeri 3 Batusangkar.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data terkumpul direduksi dan disajikan, langkah terakhir dalam menganalisis data menarik kesimpulan. Data-data tersebut terkumpulkan dari hasil pengamatan. Pada dasarnya, penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjelaskan hasil yang diperoleh dalam penelitian. Hasil penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang ada. Ketiga proses analisis tersebut saling berkaitan, sehingga menemukan hasil akhir dari penelitian data yang disajikan secara sistematis berdasarkan tema-tema yang dirumuskan.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data perlu teliti kreadibilitasnya dengan menggunakan teknik pemeriksaan. Untuk itu, dalam penelitian

ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menemukan lebih banyak perspektif terkait data yang ditemukan, tujuan untuk melengkapi informasi yang sesuai dengan fakta di lapangan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Cara meningkatkan kepercayaan penelitian adalah dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Dalam penelitian tentang dampak kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMP Negeri 3 Batusangkar, peneliti mengecek data yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Temuan Umum

a. Identifikasi Sekolah

Tabel 4.1
Profil SMPN 3 Batusangkar

PROFIL SMPN 3 BATUSANGKAR	
Kepala Sekolah	: Yermala Dewita, S. Pd.
Alamat	: Jalan Sudirman-Lima Kaum, Batusangkar
Kecamatan	: Lima Kaum
Kabupaten	: Tanah Datar
Provinsi	: Sumatera Barat
Telepon	: 075271550
Status Sekolah	: Negeri
NSS/NPSS	: 201080705010/10302423
SK	: 0833/68.2/LL-1998
Akreditasi	: A
Integrasi	: 1965 (Sekolah Teknik) 1970 (SMP)
Status Tanah	: Hak Milik (Bersertifikat)
Luas Tanah	: 9.000 m ²
Nama Bank	: Bank Nagari Cab. Batusangkar

Sumber: Tata Usaha SMPN 3 Batusangkar

b. Sejarah SMPN 3 Batusangkar

SMPN 3 Batusangkar merupakan salah satu sarana pendidikan untuk menjawab tantangan bagi peningkatan kualitas sumber daya Indonesia. SMPN 3 Batusangkar merupakan Sekolah Menengah

Pertama (SMP) yang didirikan pada tanggal 31 Maret 1965 yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sekolah ini dibangun di atas tanah milik pemerintah.

Sekolah ini bertempat yang sangat strategis di mana terletak di tepi jalan raya Batusangkar-Padang Panjang deretan sekolah antara Kapolsek Lima Kaum dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanah Datar dan di seberang jalan terdapat Kantor Camat Lima Kaum yang berdampingan antara Koramil dan Puskesmas Lima Kaum 1. Pendirian SMPN 3 Batusangkar dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang putus sekolah terutama sekolah tamat SD karena tidak tersedia sarana dan prasarana yang tinggi yaitu SMP dan banyak diantaranya yang melanjutkan pendidikan keluar daerah yang justru akan memakan biaya yang lebih mahal. Berdirinya SMPN 3 Batusangkar juga sangat didukung oleh pemerintah setempat melalui DPD dan DPRD serta tokoh masyarakat setempat. Berdirinya SMPN 3 Batusangkar Kabupaten Tanah Datar juga dilatarbelakangi oleh Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Batusangkar.

Pembangunan SMPN 3 Batusangkar Kabupaten Tanah Datar tidak memiliki panitia khusus, akan tetapi langsung dipimpin oleh Bupati Tanah Datar dengan bantuan masyarakat. Alat-alat pembelajaran dan mobiler didapat dari pemerintah daerah dan POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Majelis Guru).

c. **Visi dan Misi SMPN 3 Batusangkar**

1). **Visi**

SMPN 3 Batusangkar memiliki visi sebagai berikut:

“Bariman, Bartaqwa, Berprestasi, Berkarakter, Berbudaya, Cerdas dan Terampil”.

2). **Misi**

Untuk mencapai visi tersebut, maka SMPN 3 Batusangkar memiliki misi sebagai berikut:

- a) Membina dan menumbuhkembangkan penghayatan dan pengalaman ajaran agama dan budaya daerah
- b) Menanamkan perilaku jujur, disiplin, taat aturan
- c) Memupuk sikap optimis, berpikiran positif
- d) Memupuk sikap suka bekerjasama
- e) Membangun jaringan sosial baik secara tatap muka maupun memanfaatkan media massa
- f) Membangun budaya sekolah yang berorientasi ke masa depan
- g) Menerapkan pemakaian TIK dalam berbagai kegiatan di sekolah
- h) Memberikan pelayanan prima pada masyarakat
- i) Melaksanakan pembelajaran secara efektif
- j) Pengembangan potensi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler
- k) Mendorong terjadinya inovasi dalam pelaksanaan PBM

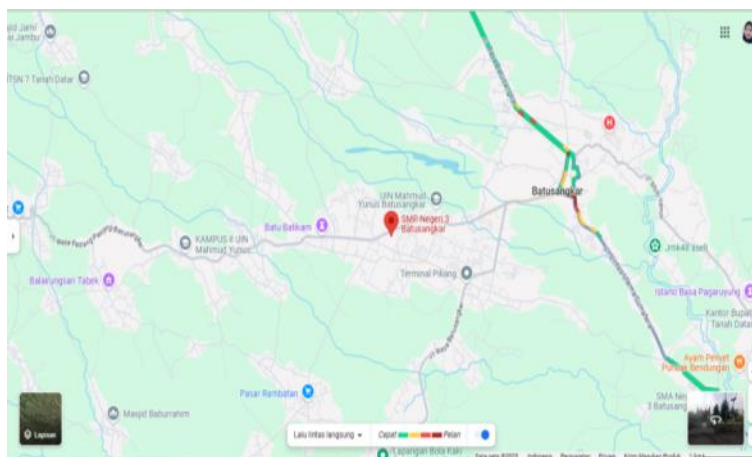
d. Tujuan SMPN 3 Batusangkar

Adapun yang menjadi tujuan SMPN 3 Batusangkar yaitu sebagai berikut:

- 1). Guru dan Siswa mengamalkan ajaran agama serta budaya daerah dalam kegiatan PBM dan hidup sehari-hari
- 2). Siswa dan Guru memiliki standar tinggi dalam setiap kegiatan yang dilakukannya
- 3). Berperilaku jujur, disiplin, taat aturan
- 4). Rata-rata ANBK
- 5). 100% siswa yang lulus diterima pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi
- 6). Terbentuk ikatan alumni yang aktif membantu pengembangan SMP Negeri 3 Batusangkar
- 7). Bersikap optimis, berpikiran positif
- 8). Memiliki sikap suka bekerjasama
- 9). Membangun jaringan sosial baik secara tatap muka maupun memanfaatkan media massa.

- 10).Terbangunnya budaya sekolah yang berorientasi ke masa depan
- 11).Menjadi rujukan untuk pengelolaan sekolah berwawasan lingkungan
- 12).Terlaksananya pemakaian TIK dalam berbagai kegiatan di sekolah.

e. Lokasi SMPN 3 Batusangkar



Gambar 4.1Peta Lokasi SMPN 3 Batusangkar

Alamat SMPN 3 Batusangkar terletak di Jl. Sudirman Lima Kaum, Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat. Letaknya cukup strategis, terletak di tepi jalan raya Batusangkar-Padang Panjang. Posisi SMPN 3 Batusangkar ini ditengah-tengah kapolsek dan MAN 2 Tanah Datar, di seberangnya kantor camat Lima Kaum atau gedung serbaguna yang berdampingan antara Koramil dan Puskesmas Lima Kaum I.

f. Data Siswa Baru SMPN 3 Batusangkar

Tabel 4.2
Jumlah Peserta Didik Baru SMP Negeri 3 Batusangkar

No	Tahun Pelajaran	Jumlah Siswa
1.	2019/2020	216
2.	2020/2021	153
3.	2021/2022	109
4.	2022/2023	127
5.	2023/2024	133
6	2024/2025	147

Sumber: Tata Usaha SMPN 3 Batusangkar

g. Data Wilayah dan Jarak

Tabel 4.3
Data Wilayah dan Jarak SMP Negeri 3 Batusangkar

No	Wilayah	Jarak
1.	Baringin	3 KM
2.	Cubadak	4 KM
3.	Labuah	4 KM
4.	Limo Kaum	1 KM

Sumber: Tata Usaha SMPN 3 Batusangkar

h. Sarana dan Prasarana SMPN 3 Batusangkar

Kondisi nyata di SMPN 3 Batusangkar Kabupaten Tanah Datar memiliki 15 ruang kelas. Lahan memiliki status hak tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagunan gedung dilengkapi listrik dengan daya 23.000 Watt, dan secara berkala dilakukan pemeliharaan baik ringan atau berat (Kebersihan, Kenyamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan). Setiap ruang kelas dilengkapi sarana meliputi kursi, meja peserta didik, lemari dan papan panjang, media pembelajaran seperti papan tulis, dan perlengkapan lain (tempat sampah, tempat cuci tangan, jam dinding, soket listrik). Setiap ruangan kelas memiliki pencahayaan yang memadai, hanya saja ruangan belum terpasang perangkat ICT (LCD Proyektor).

Tabel 4.4
Data Sarana dan Prasarana SMPN 3 Batusangkar

No	Jenis Sarpras	Jumlah
1	Ruang Kelas	15
2	Ruang Perpustakaan	1
3	Ruang Laboratorium	3

Sumber: Tata Usaha SMPN 3 Batusangkar

Dari data di atas dijelaskan bahwa SMPN 3 Batusangkar memiliki 15 Ruang Kelas. Kelas VII memiliki 5 ruang kelas, terdiri dari ruang kelas VII.1, ruang kelas VII.2, ruang kelas VII.3, ruang kelas VII.4, dan ruang kelas VII.5. kemudian kelas VIII memiliki 5 ruang kelas juga, terdiri dari ruang kelas VIII.1, ruang kelas VIII.2, ruang kelas VIII.3, ruang kelas VIII.4, ruang kelas VIII.5. kemudian kelas IX memiliki 4 ruang kelas, terdiri ruang kelas IX.1, ruang kelas IX.2, ruang kelas IX.3, ruang kelas

IX.4, ruang kelas IX.5. Untuk perpustakaan di SMPN 3 Batusangkar ini memiliki 1 perpustakaan, dan memiliki 3 ruang laboratorium, terdiri dari 2 ruang labor komputer dan 1 ruang labor biologi.

i. Data Prestasi Sekolah

Tabel 4.5
Prestasi Akademik Dan Non-Akademik Tahun 2022

No	Jenis Kejuaraan	Tingkat	Prestasi
1	Cerdas Qur'an	Se-Kabupaten Tanah Datar	Juara 3
2	Rangking 1 Antar Smp/Mts	Se- Kecamatan Lima Kaum	Juara 1
3	Lomba Puisi Hari Pahlawan	Se-Kabupaten Tanah Datar	Harapan 2

Tabel 4.6
Prestasi Akademik Dan Non-Akademik Tahun 2023-2024

No	Jenis Kejuaraan	Tingkat	Prestasi
1	Cerdas Qur'an	Se-Kabupaten Tanah Datar	Harapan 1
2	Rangking 1	Se- Sumatera Barat	Juara 1
3	Rangking 1	Se- Sumatera Barat	Juara 1
4	Kejuaraan Tinju Walikota Padang Ke-3	Se-Sumatera Barat	Juara Umum 2
5	MSQ/MTQ	Kabupaten	Harapan 1
6	Waqaf 1000 Hafizh Cabang 10 Juz	Kabupaten	Peringkat 3
7	Gambar Ilustrasi	Kabupaten	Juara 2
8	MSQ/MTQ	Kabupaten	Harapan 3
9	Olimpiade Matematika	Kabupaten	Juara 1
10	MSQ	Kecamatan	Juara 3
11	Kejuaraan Sepak Bola	Kabupaten	Juara 1
12	Kejuaraan Sepak Bola	Sumatera Barat	Juara 3
13	Gala Siswa	Provinsi	Juara 3
14	MSQ	Kecamatan Lima Kaum	Juara 1
15	MFQ	Kecamatan Lima Kaum	Juara 2
16	MSQ	Kecamatan Lima Kaum	Juara 3
17	Gala Siswa	Kabupaten	Juara 1

18	Gala Siswa	Provinsi	Juara 3
19	Cerdas Cermat Antar SMP/Mts	Kabupaten	Juara 2
20	Lomba Nasyid	Provinsi	Harapan 3
21	Lomba Cakbur Antar SMP/Mts	Kecamatan	Juara 1
22	Gerak Jalan	Kabupaten	Juara 3
23	Pawai Alegoris 17 Agustus	Kabupaten	Juara 3
24	Gala Siswa	Kecamatan	Juara 1

2. Temuan Khusus

Dalam menganalisis dampak penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Pemerintah dalam hal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya untuk memperbaiki sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan yaitu Peraturan Nomor 14 Tahun 2018, yang dalam Pasal 16 Ayat (1) menyatakan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dalam zona terdekat dari sekolah dengan kuota minimal 90% dari total penerimaan siswa baru. Kebijakan ini kemudian disempurnakan melalui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 mengenai penerimaan peserta didik baru di berbagai jenjang pendidikan. Kebijakan sistem zonasi mengatur agar penerimaan peserta didik baru dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal calon siswa ke sekolah tujuan. Akibatnya, sekolah hanya dapat menerima siswa dari wilayah yang telah ditentukan dalam zona tersebut, sehingga calon siswa dari luar zona tidak memiliki kesempatan untuk diterima.

Deskripsi yang berkaitan dengan hasil penelitian ini, disusun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP

Negeri 3 Batusangkar, berikut peneliti deskripsikan hasil wawancara dalam penelitian ini. Kegiatan wawancara peneliti lakukan kepada beberapa pihak yaitu Kepala Sekolah, Guru, Peserta Didik, dan Masyarakat atau Wali Murid.

a. Dampak Positif Sistem Zonasi di SMPN 3 Batusangkar

Sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kebijakan yang diterapkan dalam proses penerimaan peserta didik baru berdasarkan wilayah atau zona tempat tinggal mereka. Tujuan untuk mendekatkan akses pendidikan bagi siswa, sehingga mereka dapat bersekolah di sekolah yang berada di dekat tempat tinggalnya. Sistem ini dirancang untuk mengurangi kesenjangan pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit. Melalui sistem ini, prioritas diberikan kepada siswa yang tinggal di zona terdekat dengan sekolah, tanpa terlalu mengutamakan nilai akademis sebagai faktor utama penerimaan.

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah SMPN 3 Batusangkar yang menjelaskan tentang apakah SMPN 3 Batusangkar sudah menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Adapun peneliti melakukan wawancara dengan Yermala Dewita S. Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Batusangkar hasil wawancara tersebut yang terangkum sebagai berikut:

“Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) telah diterapkan di SMPN 3 Batusangkar. Sistem zonasi PPDB ini telah diterapkan sejak tahun 2021.”(Kepala Sekolah, wawancara, SMPN 3 Batusangkar: Rabu 6 November 2024, Pukul 11.00 WIB)

Diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Darma Yetti S.Pd selaku Wakil Kesiswaan sekaligus Guru di SMPN 3 Batusangkar, mengungkapkan bahwa:

“Sistem zonasi PPDB ini sudah diterapkan sejak 2021 di SMPN 3 Batusangkar.”(Sumber: wawancara, SMPN 3 Batusangkar: Selasa 5 November 2024, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan Wakil Kesiswaan SMPN 3 Batusangkar dapat disimpulkan bahwa sistem zonasi PPDB ini telah diterapkan sejak tahun 2021. Adapun peneliti melakukan wawancara dengan Yermala Dewita S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Batusangkar mengenai apakah sistem zonasi ini berdampak terhadap sekolah, mengungkapkan bahwa:

“Ya, kebijakan sistem zonasi PPDB ini tentunya dapat memberikan dampak terhadap sekolah maupun lingkungan sekitar sekolah ini. Dampak tersebut akan memberikan dampak positif maupun negatif terhadap sekolah, guru, peserta didik, dan masyarakat atau wali murid.”(Sumber: wawancara, SMPN 3 Batusangkar: Rabu 6 November 2024, Pukul 11.00)

Diperkuat dengan hasil wawancara dengan Darma Yetti S.Pd selaku Wakil Kesiswaan sekaligus Guru di SMPN 3 Batusangkar, mengungkapkan bahwa:

“Ya, setelah diterapkannya sistem zonasi PPDB tentunya memberikan dampak baik maupun tidak baik bagi sekolah dan lingkungan sekitarnya.”(Sumber: wawancara, SMPN 3 Batusangkar: Selasa 5 November 2024, Pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan Wakil Kesiswaan SMPN 3 Batusangkar tersebut dapat disimpulkan bahwasannya sistem zonasi PPDB setelah diterapkan di SMPN 3 Batusangkar memberikan dampak terhadap sekolah maupun lingkungan sekitar SMPN 3 Batusangkar. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 3 Batusangkar berkaitan dengan bagaimana dampak positif yang ditimbulkan setelah diterapkan sistem zonasi PPDB di SMPN 3 Batusangkar sebagai berikut:

“Dampak baik yang ditimbulkan setelah diterapkan sistem zonasi PPDB di sekolah ini seperti akses pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kesempatan yang sama bagi setiap siswa, terutama bagi calon siswa yang tinggal di dekat SMPN 3 Batusangkar. Kemudian sistem zonasi PPDB ini juga berdampak baik bagi interaksi sosial di lingkungan sekolah, dan berdampak baik juga dalam proses pembelajaran”(Sumber: wawancara, SMPN 3 Batusangkar: Rabu 6 November 2024, Pukul 11.00 WIB)

Diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Darma Yetti S.Pd selaku Wakil Kesiswaan sekaligus Guru SMPN 3 Batusangkar, mengungkapkan bahwa:

“Dampak yang ditimbulkan setelah diterapkan sistem zonasi PPDB memberikan dampak baik di sekolah ini seperti akses pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa, kemudian juga berdampak baik bagi kualitas pendidikan yang dapat menghilangkan diskriminasi dan pengelompokan sekolah, seperti label sekolah menghilangkan label sekolah favorit dan non-favorit.”(Sumber: wawancara, SMPN 3 Batusangkar: Selasa 5 November 2024, Pukul 11.30)



Gambar 4.2 Brosur Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Sekolah dan Wakil Kesiswaan SMPN 3 Batusangkar melalui wawancara disimpulkan bahwasannya sistem zonasi PPDB ini menimbulkan dampak baik bagi akses pendidikan dan kualitas pendidikan, kemudian berdampak pada interaksi sosial di lingkungan sekolah, serta dalam proses pembelajaran.

Sistem zonasi dalam pendidikan dirancang untuk meningkatkan kesempatan yang sama bagi setiap siswa, terutama bagi calon siswa yang tinggal di dekat SMPN 3 Batusangkar. Dengan kebijakan ini, calon siswa yang tinggal dekat dengan SMPN 3 Batusangkar memiliki peluang besar diterima di SMPN 3 Batusangkar, tanpa dibatasi oleh nilai. Sehingga mengurangi ketimpangan akses pendidikan antara wilayah di sekitar SMPN 3 Batusangkar. Adapun dampak positif yang dirasakan oleh SMPN 3 Batusangkar setelah menerapkan sistem zonasi sebagai berikut:

1) Meberikan Kesempatan yang Setara Bagi Seluruh Siswa

Sistem zonasi dalam PPDB di SMPN 3 Batusangkan memberikan peluang yang setara bagi semua siswa untuk bersekolah di sekolah terdekat tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial atau akademis. Artinya setiap siswa memiliki peluang yang adil untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di sekolah terdekat dengan tempat tinggal siswa. Adapun peneliti melakukan wawancara dengan Yermala Dewita S. Pd selaku Kepala Sekolah di SMPN 3 Batusangkar mengenai bagaimana dampak sistem zonasi PPDB terhadap kesempatan bagi seluruh siswa, mengungkapkan bahwa:

“Sistem zonasi ini diterapkan untuk memastikan semua siswa, terutama siswa yang tinggal di sekitar sekolah ini, untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Di SMPN 3 Batusangkar ini, kami melihat adanya peningkatan jumlah siswa.”(Sumber: wawancara, di ruang Kepala Sekolah: Rabu 6 November 2024)

Diperkuat dengan hasil wawancara dengan Darma Yetti S.Pd selaku Wakil Kesiswaan sekaligus Guru di SMPN 3 mengenai apa dampak sistem zonasi PPDB, mengungkapkan bahwa:

“Dampaknya, dapat memberikan kesempatan bagi seluruh siswa untuk bersekolah dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga dapat meningkatkan jumlah siswa dari lingkungan sekitar sekolah, serta mendorong partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah.”(Guru, wawancara, SMPN 3 Batusangkar : Selasa 5 November 2024)

Tabel 4.7Jumlah Peserta Didik Baru SMP Negeri 3 Batusangkar

No	Tahun Pelajaran	Jumlah Siswa
1.	2019/2020	216
2.	2020/2021	153
3.	2021/2022	109
4.	2022/2023	127
5.	2023/2024	133
6	2024/2025	147

Sumber: Tata Usaha SMPN 3 Batusangkar

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari Kepala Sekolah dan Wakil Kesiswaan sekaligus Guru SMPN 3 Batusangkar di atas dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkan sistem

zonasi PPDB dapat memberikan kesempatan yang sama bagi siswa untuk diterima di sekolah yang dekat dengan rumah, sehingga jumlah siswa di SMPN 3 Batusangkar dapat meningkat, dengan bukti pada Tabel 4.7 di atas, jumlah siswa baru di SMPN 3 Batusangkar meningkat dari tahun 2022 yang berjumlah 127 siswa, pada tahun 2023 yang berjumlah 133 siswa, sampai tahun 2024 berjumlah 147 siswa. Dengan bertambahnya jumlah siswa, sekolah diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya dengan lebih optimal, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memperkuat komunitas sekolah.

Kebijakan ini tentu berdampak langsung pada siswa di sekitar lingkungan SMPN 3 Batusangka. Siswa dari latar belakang ekonomi, sosial dan akademik dapat belajar bersama dalam satu kelas. Adapun peneliti melakukan wawancara dengan Yermala Dewita S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Batusangkar mengenai pihak-pihak yang merasakan dampak sistem zonasi PPDB, mengungkapkan bahwa:

“Sistem zonasi PPDB tentunya memberikan dampak terhadap siswa, tanpa memandang status ekonomi atau nilai akademik sebelumnya, memiliki peluang yang sama untuk diterima.”(sumber: wawancara, Rabu 6 November 2024, di ruang Kepala Sekolah, Pukul 11.00 WIB)

Diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Darma Yetti S.Pd selaku Wakil Kesiswaan sekaligus Guru SMPN 3 Batusangkar, mengenai pihak-pihak yang merasakan dampak sistem zonasi PPDB, mengungkapkan bahwa:

“Sistem zonasi PPDB tentunya memberikan dampak terhadap siswa, baik siswa yang dari keluarga kurang mampu sekarang memiliki kesempatan belajar di sekolah yang merekainginkan.”(sumber: wawancara, Selasa 5 November 2024, di ruang Tata Usaha, Pukul 11.00 WIB)

Diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Nailatul Qodriyah selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai pihak-pihak yang merasakan dampak sistem zonasi PPDB, mengungkapkan bahwa:

“saya dan teman-teman yang tinggal di lingkungan yang sama sekarang dapat bersekolah dan belajar bersama di SMPN 3 Batusangkar.”(sumber: wawancara, Selasa 5 November 2024, di gazebo sekolah, Pukul 11.00 WIB)

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Annisa Aprilia selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai pihak-pihak yang merasakan dampak sistem zonasi PPDB, mengungkapkan bahwa:

“saya dan teman-teman yang tinggal di sekitar rumah kini dapat bersekolah di tempat yang sama dan belajar bersama di SMPN 3 Batusangkar.”(sumber: wawancara, Selasa 5 November 2024, di gazebo sekolah, Pukul 11.00 WIB)

Selanjutnya diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Aulia Qorry Andini selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai pihak-pihak yang merasakan dampak sistem zonasi PPDB, mengungkapkan bahwa:

“saya merasakan dampak sistem zonasi PPDB ini. Selain saya, teman-teman saya juga merasakannya. Kami yang tinggal berdekatan kini bisa bersekolah di SMPN 3 Batusangkar.”(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di dalam kelas, Pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Salwa Aprilia Carleka selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai pihak-pihak yang merasakan dampak sistem zonasi PPDB, mengungkapkan bahwa:

“saya dan teman-teman bisa bersekolah di SMPN 3 Batusangkar bersama karena rumah kami berdekatan.”(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di dalam kelas, Pukul 10.00 WIB)

Selanjutnya diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Adzka Adzkiyah selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai pihak-pihak yang merasakan dampak sistem zonasi PPDB, mengungkapkan bahwa:

“sebelum ada sistem zonasi, teman-teman saya banyak yang sekolah di tempat yang jauh, sehingga kami jarang bertemu.

Sekarang, hampir semua anak di lingkungan saya bersekolah di SMPN 3 Batusangkar, jadi lebih mudah untuk belajar bersama dan membantu satu sama lain.”(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di dalam kelas, Pukul 10.00 WIB)

Selanjutnya diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Raudhatul Az Zahra selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai pihak-pihak yang merasakan dampak sistem zonasi PPDB, mengungkapkan bahwa:

“saya melihat tidak hanya siswa yang merasakan dampak sistem zonasi ini, tetapi juga orang tua kami. Mereka lebih tenang kami bersekolah di tempat yang dekat dengan rumah, sehingga tidak perlu khawatir dengan biaya transportasi dan perjalanan jauh.”(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di dalam kelas, Pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Atika selaku Wali Murid SMPN 3 Batusangkar, mengenai pihak-pihak yang merasakan dampak sistem zonasi PPDB, mengungkapkan bahwa:

“Semua anak di lingkungan kami merasakan manfaat dari sistem zonasi ini. Mereka kini lebih mudah mengakses pendidikan yang layak.”(sumber: wawancara, Jum’at 8 November 2024, di rumah siswa, Pukul 10.00 WIB)

Selanjutnya diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Edra selaku Wali Murid SMPN 3 Batusangkar, mengenai pihak-pihak yang merasakan dampak sistem zonasi PPDB, mengungkapkan bahwa:

“Semua anak di lingkungan sekitar SMPN 3 Batusangkar ini, jadi punya kesempatan yang sama untuk bersekolah di sekolah ini.”(sumber: wawancara, Jum’at 8 November 2024, di rumah siswa, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, Guru, Siswa dan Wali murid, dapat disimpulkan bahwa sistem zonasi berdampak langsung pada siswa di SMPN 3 Batusangkar. Kebijakan ini memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh siswa untuk mendapatkan akses pendidikan di sekolah terdekat. Selain itu, sistem zonasi PPDB juga berdampak pada orang tua siswa, yang merasa lebih

tenang karena anak-anak mereka dapat bersekolah di lingkungan yang lebih dekat dan lebih mudah di jangkau tanpa biaya transportasi tambahan. Selain itu, interaksi sosial di antara siswa semakin erat karena mereka berasal dari lingkungan yang sama.

Kebijakan sistem zonasi ini juga diterapkan di sekolah negeri lainnya, terutama di SMPN 3 Batusangkar. Kebijakan ini berfokus pada pemerataan akses pendidikan di setiap wilayah. Adapun peneliti melakukan wawancara dengan Yermala Dewita S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Batusangkar untuk mendalami dampak dari sistem zonasi PPDB dan di mana hal tersebut dirasakan:

“Sistem zonasi ini dapat dirasakan di lingkungan sekolah ini dan sekolah lain yang berada dalam wilayah zonasi masing-masing.”(sumber: wawancara, Rabu 6 November 2024, di Ruang Kepala Sekolah, Pukul 11.00 WIB)

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan Darma Yetti S.Pd selaku Wakil Kesiswaan sekaligus Guru SMPN 3 Batusangkar mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan di mana hal tersebut dirasakan. Menyatakan bahwa:

"Sistem zonasi ini terasa di dalam kelas. Terlihat bahwa siswa dari berbagai kondisi sosial bisa belajar bersama. Siswa dengan latar belakang yang beragam dapat berinteraksi dan belajar satu sama lain dalam kelas yang inklusif, berkat sistem zonasi ini."(sumber: wawancara, Selasa 5 November 2024, di Ruang Tata Usaha, Pukul 11.00 WIB)

Peneliti juga mewawancarai Nailatul Qodriyah SMPN 3 Batusangkar mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan di mana hal tersebut dirasakan. Menyampaikan bahwa:

"Di SMPN 3 Batusangkar ini, sekolah terdekat dari rumah saya, Kak. Teman-teman saya juga banyak yang sekolah di sini."(sumber: wawancara, Selasa 5 November 2024, di Gazebo Sekolah, Pukul 10:00 WIB)

Peneliti kemudian mewawancarai Annisa Aprilia seorang siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan di mana hal tersebut dapat dirasakan. Ia menyatakan bahwa:

"Di dalam kelas, Kak. Kami bisa belajar bersama meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Kami tidak membedakan teman karena kami tinggal di lingkungan yang sama."(sumber: wawancara, Selasa 5 November 2024, di Gazebo Sekolah, Pukul 10:00 WIB)

Peneliti kemudian mewawancarai Aulia Qory Andini seorang siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan di mana hal tersebut dapat dirasakan. Menyatakan bahwa:

"Saya merasakan dampaknya di sekolah, terutama dalam pergaulan, Kak. Karena mayoritas teman berasal dari sekitar lingkungan saya, kami lebih akrab dan mudah berkomunikasi."(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di dalam kelas, Pukul 10:00 WIB)

Peneliti kemudian mewawancarai Salwa Aprilia Carleka seorang siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan di mana hal tersebut dapat dirasakan. Menyatakan bahwa:

"saya merasakan dampaknya saat perjalanan ke sekolah, Kak. Karena rumah saya dekat, saya tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi tambahan, sehingga lebih hemat."(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di dalam kelas, Pukul 10:00 WIB)

Peneliti kemudian mewawancarai Salwa Aprilia Carleka seorang siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan di mana hal tersebut dapat dirasakan. Menyatakan bahwa:

"Dampak sistem zonasi ini terasa di dalam kelas. Kami bisa belajar bersama tanpa merasa ada perbedaan karena kami berasal dari lingkungan yang sama."(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di dalam kelas, Pukul 10:00 WIB)

Peneliti kemudian mewawancarai Adzka Adzkiya seorang siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan di mana hal tersebut dapat dirasakan. Menyatakan bahwa:

“Saya merasakan dampaknya di lingkungan sekolah, Kak. Karena teman-teman saya berasal dari daerah sekitar, saya jadi lebih mudah bergaul dan merasa nyaman dalam berinteraksi.”(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di dalam kelas, Pukul 10:00 WIB)

Peneliti kemudian mewawancarai Raudhatul Az Zahra seorang siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan di mana hal tersebut dapat dirasakan. Menyatakan bahwa:

“Di dalam kelas, kami bisa lebih kompak karena sudah saling mengenal sejak sebelum masuk sekolah. Jadi, kalau ada tugas kelompok atau belajar bersama, kami lebih mudah bekerja sama.”(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di dalam kelas, Pukul 10:00 WIB)

Peneliti kemudian mewawancarai Nuri seorang siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan di mana hal tersebut dapat dirasakan. Menyatakan bahwa:

“Dampaknya terasa juga di luar sekolah, Kak. Karena teman-teman sekolah saya tinggal di sekitar rumah, kami bisa belajar bersama di rumah dan saling membantu jika ada tugas.”(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di dalam kelas, Pukul 10:00 WIB)

Peneliti kemudian mewawancarai Atika selaku Wali Murid SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan di mana hal tersebut dapat dirasakan. Menyatakan bahwa:

“SMPN 3 Batusangkar adalah sekolah yang sangat dekat dengan tempat tinggal kami. Semua anak mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama, baik di sekolah maupun di rumah.”(sumber: wawancara, Jum’at 8 November 2024, di rumah, Pukul 10:00 WIB)

Peneliti kemudian mewawancarai Edra selaku Wali Murid SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan di mana hal tersebut dapat dirasakan. Menyatakan bahwa:

“Menurut saya, sistem zonasi ini sangat membantu. Anak saya bisa bersekolah di SMPN 3 Batusangkar yang jaraknya tidak jauh dari rumah. Dengan begitu, waktu perjalanan ke sekolah lebih singkat, dan kami tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi tambahan.”(sumber: wawancara, Sabtu 9 November 2024, di rumah, Pukul 10:00 WIB)

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah, guru, siswa, dan wali murid, dapat disimpulkan bahwa sistem zonasi ini berdampak pada siswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Sistem zonasi di SMPN 3 Batusangkar telah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa. Dengan adanya sistem ini, siswa dan teman-temannya yang tinggal berdekatan dapat bersekolah dan belajar bersama di sekolah yang sama, yaitu SMPN 3 Batusangkar.

Sistem zonasi dalam PPDB mulai diterapkan oleh pemerintah, dan dampaknya sudah bisa dirasakan sejak awal penerapannya. Untuk mengetahui lebih lanjut kapan dampak ini mulai terasa, peneliti melakukan wawancara dengan Yermala Dewita S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Batusangkar. Dalam wawancara tersebut, informan menjelaskan bahwa:

“Sejak sistem zonasi diterapkan di sekolah ini, dampaknya mulai terasa, terutama pada tahun pertama penerapannya di 2021.”(sumber: wawancara, Rabu 6 November 2024, di Ruang Kepala Sekolah, Pukul 11.00 WIB)

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan Darma Yetti S.Pd selaku Wakil Kesiswaan sekaligus Guru SMPN 3 Batusangkar mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan kapan dampak ini mulai dirasakan. Menyatakan bahwa:

"Sistem zonasi ini mulai terasa sejak aturan zonasi mulai diberlakukan di sekolah ini, itu pada tahun 2021."(sumber: wawancara, Selasa 5 November 2024, di Ruang Tata Usaha, Pukul 11.00 WIB)

Peneliti juga mewawancarai Nailatul Qodriyah SMPN 3 Batusangkar mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan kapan hal tersebut dirasakan. Menyampaikan bahwa:

"Dampaknya terasa setelah pendaftaran pakai sistem zonasi. Saya bisa sekolah dekat rumah dan langsung diterima tanpa melihat nilai."(sumber: wawancara, Selasa 5 November 2024, di Gazebo Sekolah, Pukul 10:00 WIB)

Peneliti kemudian mewawancarai Annisa Aprilia seorang siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan kapan hal tersebut dapat dirasakan. Ia menyatakan bahwa:

"Saya baru merasakan dampaknya setelah pendaftaran, kak. Saya diterima langsung tanpa dilihat nilainya, tapi dari tempat tinggal saya."(sumber: wawancara, Selasa 5 November 2024, di Gazebo Sekolah, Pukul 10:00 WIB)

Peneliti kemudian mewawancarai Aulia Qory Andini seorang siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan kapan hal tersebut dapat dirasakan. Menyatakan bahwa:

"Setelah daftar pada sistem zonasi, dampaknya langsung terasa. Saya diterima karena rumah saya dekat sekolah."(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di dalam kelas, Pukul 10:00 WIB)

Peneliti kemudian mewawancarai Salwa Aprilia Carleka seorang siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan kapan hal tersebut dapat dirasakan. Menyatakan bahwa:

"Saya merasakan dampaknya saat pendaftaran. Teman-teman saya yang rumahnya jauh dari sekolah tidak bisa masuk, sedangkan saya yang rumahnya dekat langsung

diterima.”(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di dalam kelas, Pukul 10:00 WIB)

Peneliti kemudian mewawancarai Salwa Aprilia Carleka seorang siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan kapan hal tersebut dapat dirasakan. Menyatakan bahwa:

“Sistem zonasi terasa banget pas daftar sekolah. Saya enggak perlu khawatir soal nilai karena yang penting rumah saya dekat sekolah.”(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di dalam kelas, Pukul 10:00 WIB)

Peneliti kemudian mewawancarai Adzka Adzkiya seorang siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan kapan hal tersebut dapat dirasakan. Menyatakan bahwa:

“Sejak zonasi diterapkan, masuk sekolah jadi lebih gampang buat saya karena rumah saya dekat. Tapi ada teman yang enggak bisa masuk karena rumahnya di luar zona.”(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di dalam kelas, Pukul 10:00 WIB)

Peneliti kemudian mewawancarai Raudhatul Az Zahra seorang siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan kapan hal tersebut dapat dirasakan. Menyatakan bahwa:

“Saya baru sadar dampaknya setelah daftar. Banyak teman saya yang dulu pengen sekolah di sini jadi enggak bisa masuk karena sistem zonasi.”(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di dalam kelas, Pukul 10:00 WIB)

Peneliti kemudian mewawancarai Nuri seorang siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan kapan hal tersebut dapat dirasakan. Menyatakan bahwa:

“Saya merasa dampaknya saat daftar sekolah. Saya senang bisa masuk SMPN 3 Batusangkar karena rumah saya dekat.”(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di dalam kelas, Pukul 10:00 WIB)

Peneliti kemudian mewawancarai Atika selaku Wali Murid SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan kapan hal tersebut dapat dirasakan. Menyatakan bahwa:

“Saya merasakan dampaknya sejak anak saya mendaftar sekolah. Untungnya, rumah kami dekat dengan SMPN 3 Batusangkar, jadi anak saya bisa langsung diterima.”(sumber: wawancara, Jum’at 8 November 2024, di rumah, Pukul 10:00 WIB)

Peneliti kemudian mewawancarai Edra selaku Wali Murid SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak sistem zonasi PPDB dan kapan hal tersebut dapat dirasakan. Menyatakan bahwa:

“waktu sistem zonasi mulai diterapkan, saya baru sadar kalau sekarang bukan nilai yang jadi penentu utama, tapi jarak rumah ke sekolah. Anak saya bisa masuk tanpa harus bersaing nilai, tapi saya juga kasihan dengan anak-anak yang rumahnya jauh dan akhirnya enggak bisa sekolah di sini.”(sumber: wawancara, Sabtu 9 November 2024, di rumah, Pukul 10:00 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, guru, siswa, dan wali murid di SMPN 3 Batusangkar, dapat disimpulkan bahwa dampak sistem zonasi mulai dirasakan sejak awal penerapannya pada tahun 2021. Secara umum, ada beberapa pola yang muncul dari hasil wawancara: Siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah merasa diuntungkan, banyak siswa menyatakan bahwa mereka langsung diterima tanpa harus mempertimbangkan nilai akademik, karena faktor utama yang diperhitungkan adalah jarak rumah ke sekolah. Siswa yang rumahnya jauh merasa dirugikan, beberapa siswa dan wali murid menyebutkan bahwa sistem ini membuat anak-anak dengan nilai bagus tetapi tinggal di luar zona menjadi sulit masuk ke sekolah yang diinginkan. Orang tua menyadari perubahan sistem seleksi, para wali murid awalnya tidak menyangka bahwa nilai akademik tidak lagi menjadi faktor utama dalam seleksi penerimaan siswa baru. Beberapa

merasa beruntung karena anak mereka masuk dengan mudah, sementara yang lain merasa kecewa karena anak mereka gagal masuk akibat lokasi tempat tinggal. Sekolah mulai merasakan perubahan komposisi siswa, Kepala sekolah dan guru menyebutkan bahwa sejak sistem zonasi diterapkan, latar belakang akademik siswa yang diterima menjadi lebih beragam, tidak lagi didominasi oleh siswa dengan nilai tertinggi seperti sebelum adanya zonasi. Sistem zonasi membawa dampak yang cukup signifikan bagi siswa, wali murid, dan pihak sekolah. Ada sisi positif, seperti kemudahan akses bagi siswa yang rumahnya dekat, tetapi juga ada tantangan bagi mereka yang berada di luar zona meskipun memiliki prestasi akademik yang baik.

2) Jarak Sekolah yang Dekat

Sistem zonasi PPDB memudahkan siswa karena mereka bisa bersekolah di tempat yang lebih dekat dari rumah. Dengan begitu, siswa bisa datang tepat waktu, tidak mudah lelah, dan menghemat biaya transportasi. Sekolah yang dekat juga lebih mudah dijangkau dan mengurangi pengeluaran untuk ongkos perjalanan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Yermala Dewita S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak positif sistem zonasi terhadap jarak sekolah yang lebih dekat bagi siswa. Mengungkapkan bahwa:

“Menurut Ibu, sistem zonasi ini membantu siswa lebih disiplin karena mereka bisa datang ke sekolah tepat waktu. Selain itu, mereka punya lebih banyak waktu untuk istirahat dan belajar di rumah. Hal ini tentu bisa meningkatkan kualitas pendidikan.”(sumber: wawancara Rabu 6 November 2024, di Ruang Kepala Sekolah, Pukul 11.00 WIB)

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Darma Yetti S.Pd selaku Wakil Kesiswaan sekaligus Guru SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak positif sistem zonasi terhadap jarak sekolah yang lebih dekat bagi siswa. Mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya, sistem zonasi ini membuat jadwal belajar lebih efektif karena siswa bisa datang tepat waktu. Selain itu, siswa juga lebih segar saat belajar karena mereka tidak kelelahan di perjalanan ke sekolah, sehingga lebih fokus di kelas.”(sumber: wawancara Selasa 5 November 2024, di Ruang Tata Usaha, pukul 11.00 WIB)

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Nailatul Qodriyah selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak positif sistem zonasi terhadap jarak sekolah yang lebih dekat bagi siswa. Mengungkapkan bahwa:

“Dengan sekolah yang dekat, saya lebih nyaman karena nggak perlu buru-buru dan panik kalau bangun agak telat”(sumber: wawancara Selasa 5 November 2024, di Gazebo Sekolah, Pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Annisa Aprilia selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak positif sistem zonasi terhadap jarak sekolah yang lebih dekat bagi siswa. Mengungkapkan bahwa:

“Dengan sekolah yang dekat, saya lebih nyaman karena nggak perlu buru-buru dan panik kalau bangun agak telat.”(sumber: wawancara Selasa 5 November 2024, di Gazebo sekolah, Pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Salwa Aprilia Carleka selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak positif sistem zonasi terhadap jarak sekolah yang lebih dekat bagi siswa. Mengungkapkan bahwa:

“Saya merasa lebih santai dan punya waktu lebih banyak buat istirahat di pagi hari karena nggak perlu bangun terlalu pagi.”(sumber: wawancara Senin 11 November 2024, di dalam kelas, pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Adzka Adzkiya selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak positif sistem zonasi terhadap jarak sekolah yang lebih dekat bagi siswa. Mengungkapkan bahwa:

“Dulu sebelum ada zonasi, saya harus naik kendaraan ke sekolah dan sering kena macet. Sekarang lebih enak, saya bisa jalan kaki dan nggak perlu keluar biaya transportasi.”(sumber: wawancara Senin 11 November 2024, di dalam kelas, pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Raudhatul Az Zahra selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak positif sistem zonasi terhadap jarak sekolah yang lebih dekat bagi siswa. Mengungkapkan bahwa:

“Saya merasa lebih tenang karena nggak perlu buru-buru setiap pagi. Kalau sekolah jauh, pasti saya sering terlambat. Sekarang jadi lebih disiplin datang tepat waktu.”(sumber: wawancara Senin 11 November 2024, di dalam kelas, pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Nuri selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak positif sistem zonasi terhadap jarak sekolah yang lebih dekat bagi siswa. Mengungkapkan bahwa:

“Saya lebih senang karena orang tua juga nggak khawatir saya pergi terlalu jauh. Kalau ada apa-apa, mereka bisa cepat ke sekolah, dan saya juga gampang pulang kalau ada keperluan.”(sumber: wawancara Senin 11 November 2024, di dalam kelas, pukul 10.00 WIB)

Peneliti kemudian mewawancarai Atika selaku Wali Murid SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak positif sistem zonasi terhadap jarak sekolah yang lebih dekat bagi siswa. Mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya, sistem zonasi ini sangat membantu karena anak saya tidak perlu pergi terlalu jauh untuk sekolah. Saya juga lebih tenang karena dia bisa berangkat sendiri tanpa harus diantar setiap hari. Selain itu, biaya transportasi juga berkurang, jadi lebih hemat.”(sumber: wawancara, Jum’at 8 November 2024, di rumah, Pukul 10:00 WIB)

Peneliti kemudian mewawancarai Atika selaku Wali Murid SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak positif sistem zonasi

terhadap jarak sekolah yang lebih dekat bagi siswa. Mengungkapkan bahwa:

“Saya merasa senang karena anak saya lebih punya waktu untuk istirahat dan belajar di rumah. Dulu sebelum ada zonasi, dia harus berangkat lebih pagi dan sering kelelahan. Sekarang dia lebih semangat sekolah karena perjalanannya lebih singkat dan nggak terlalu capek.”(sumber: wawancara, Sabtu 9 November 2024, di rumah, Pukul 10:00 WIB)

Tabel 4.8
Data Wilayah dan Jarak SMP Negeri 3 Batusangkar

No	Wilayah	Jarak
1.	Baringin	3 KM
2.	Cubadak	4 KM
3.	Labuah	4 KM
4.	Limo Kaum	1 KM

Sumber: Tata Usaha SMPN 3 Batusangkar

Berdasarkan wawancara dengan guru, siswa, dan wali murid di SMPN 3 Batusangkar, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi PPDB memiliki dampak positif, terutama dalam hal kedekatan jarak antara rumah dan sekolah. Bagi Siswa, Siswa dapat berangkat ke sekolah dengan lebih santai tanpa terburu-buru, lebih disiplin dalam datang tepat waktu karena perjalanan lebih singkat, tidak mudah lelah, sehingga lebih fokus saat belajar di kelas, memiliki lebih banyak waktu untuk istirahat dan belajar di rumah, tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi, terutama bagi yang bisa berjalan kaki ke sekolah. Bagi Guru, pembelajaran menjadi lebih efektif karena siswa datang tepat waktu dan lebih siap mengikuti pelajaran, Siswa lebih fokus di kelas karena tidak mengalami kelelahan akibat perjalanan jauh. Bagi Wali Murid, lebih tenang karena anak tidak perlu bepergian jauh untuk sekolah, tidak perlu repot mengantar anak setiap hari, terutama bagi orang tua yang bekerja, mengurangi pengeluaran biaya transportasi, Anak lebih memiliki waktu istirahat yang cukup sehingga tidak mudah kelelahan. Sistem zonasi memberikan manfaat yang nyata bagi siswa, guru, dan wali murid. Dengan sekolah yang lebih dekat,

siswa lebih disiplin, nyaman, dan siap belajar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

3) Menghemat Biaya Transportasi

Sistem zonasi PPDB juga berdampak pada menghemat biaya transportasi. Menghemat biaya transportasi ini memiliki banyak manfaat bagi siswa. Salah satu dampak utamanya adalah siswa dapat menghemat uang untuk keperluan lain, seperti membeli buku atau alat tulis. Dengan biaya transportasi yang lebih hemat, siswa dari keluarga dengan pendapatan menengah ke bawah dapat tetap bersekolah tanpa khawatir akan biaya tambahan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Yermala Dewita S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana dampak sistem zonasi PPDB terhadap biaya transportasi, mengungkapkan bahwa:

“Dulu, sebelum sistem zonasi diterapkan, banyak siswa yang datang dari daerah yang cukup jauh sehingga mereka harus menggunakan transportasi umum atau antar-jemput. Hal ini tentu menjadi beban tambahan bagi orang tua, terutama bagi mereka yang ekonominya terbatas. Sekarang, dengan adanya sistem zonasi, sebagian besar siswa bisa berjalan kaki atau menggunakan transportasi yang lebih murah. Ini sangat membantu dalam meringankan beban finansial keluarga mereka. Dengan sistem ini, juga berdampak positif pada tingkat kehadiran siswa. Dengan lokasi sekolah yang lebih dekat dari rumah, risiko keterlambatan atau ketidakhadiran siswa akibat kendala transportasi menjadi berkurang.”(sumber: wawancara Rabu 6 November 2024, di Ruang Kepala Sekolah, Pukul 11.00 WIB)

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Darma Yetti selaku Wakil Kesiswaan sekaligus Guru SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana dampak sistem zonasi PPDB terhadap biaya transportasi, mengungkapkan bahwa:

“Saya melihat banyak siswa yang lebih tenang dan tidak stres karena mereka tidak harus berpikir tentang ongkos transportasi setiap hari. Mereka lebih fokus pada pembelajaran dibandingkan

harus memikirkan bagaimana cara pulang sekolah jika tidak punya ongkos. Dari sisi kesehatan, saya rasa ini juga baik. Siswa yang berjalan kaki ke sekolah setiap hari memiliki kebiasaan hidup yang lebih sehat dibandingkan mereka yang selalu naik kendaraan. Jadi, ada manfaat lain selain hanya sekadar menghemat biaya.”(sumber: wawancara Selasa 5 November 2024, di Ruang Tata Usaha, pukul 11.00 WIB)

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Nailatul Qodriyah selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana dampak sistem zonasi PPDB terhadap biaya transportasi, mengungkapkan bahwa:

“Saya merasa terbantu karena uang yang biasanya dipakai untuk ongkos bisa saya tabung untuk beli perlengkapan sekolah atau keperluan lain. Kalau ada keperluan mendadak, saya juga punya simpanan.”(sumber: wawancara Selasa 5 November 2024, di gazebo sekolah, pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Annisa Aprilia selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana dampak sistem zonasi PPDB terhadap biaya transportasi, mengungkapkan bahwa:

“dampaknya baik, Orang tua saya juga lebih ringan bebannya karena tidak perlu lagi memikirkan uang transportasi setiap hari. Dulu sebelum zonasi, saya harus naik angkot, sekarang bisa jalan kaki ke sekolah.”(sumber: wawancara Selasa 5 November 2024, di gazebo sekolah, pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Aulia Qory Andini selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana dampak sistem zonasi PPDB terhadap biaya transportasi, mengungkapkan bahwa:

“dampaknya baik, saya jadi lebih tenang karena bisa pergi dan pulang sekolah tanpa harus memikirkan ongkos. Kalau jalan kaki pun tidak terlalu jauh.”(sumber: wawancara Senin 11 November 2024, di dalam kelas, pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Salwa Aprilia Carleka selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai

bagaimana dampak sistem zonasi PPDB terhadap biaya transportasi, mengungkapkan bahwa:

“dengan sistem zonasi yang paling saya rasakan adalah tidak khawatir lagi soal uang transportasi. Dulu kadang kalau tidak ada uang, saya harus pinjam ke teman atau minta tambahan ke orang tua. Sekarang lebih nyaman.”(sumber: wawancara Senin 11 November 2024, di dalam kelas, pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Adzka Adzkiya selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana dampak sistem zonasi PPDB terhadap biaya transportasi, mengungkapkan bahwa:

“Dulu sebelum sistem zonasi, saya harus naik ojek setiap hari, dan itu cukup mahal. Sekarang saya bisa jalan kaki atau naik sepeda ke sekolah, jadi uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan lain.”(sumber: wawancara Senin 11 November 2024, di dalam kelas, pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Raudhatul Az Zahra selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana dampak sistem zonasi PPDB terhadap biaya transportasi, mengungkapkan bahwa:

“Saya lebih senang adanya sistem zonasi, karena orang tua tidak perlu repot memberi uang transportasi setiap hari. Kadang kalau uang pas-pasan, saya harus irit di jajan atau cari cara lain buat pulang. Sekarang lebih nyaman karena sekolah dekat.”(sumber: wawancara Senin 11 November 2024, di dalam kelas, pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Nuri selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana dampak sistem zonasi PPDB terhadap biaya transportasi, mengungkapkan bahwa:

“dampaknya baik. sekolah dekat rumah, saya juga lebih leluasa kalau ada tugas yang ketinggalan atau perlu pulang sebentar. Tidak seperti dulu yang harus naik kendaraan dan butuh ongkos lebih banyak..”(sumber: wawancara Senin 11 November 2024, di dalam kelas, pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Atika selaku Wali Murid SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana dampak sistem zonasi PPDB terhadap biaya transportasi, mengungkapkan bahwa:

“sistem zonasi sangat membantu dalam hal biaya, Ibuk dan orang tua lainnya tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk transportasi anak yang berjarak jauh dari rumah. Sebaliknya, kami dapat mengurangi beban keuangan yang berkaitan dengan perjalanan anak ke sekolah, seperti ongkos transportasi umum atau biaya bahan bakar.”(sumber: wawancara Jum’at 8 November 2024, di rumah, Pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Edra selaku Wali Murid SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana dampak sistem zonasi PPDB terhadap biaya transportasi, mengungkapkan bahwa:

“sistem zonasi memberikan keuntungan. Dengan anak bersekolah di dekat rumah, Ibuk dapat menghemat pengeluaran.”(sumber: wawancara Sabtu 9 November 2024, di rumah, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, sistem zonasi PPDB di SMPN 3 Batusangkar memberikan manfaat signifikan dalam menghemat biaya transportasi bagi siswa dan orang tua. Kedekatan sekolah dengan tempat tinggal siswa membuat pengeluaran untuk transportasi berkurang drastis, meningkatkan kedisiplinan, serta mengurangi tekanan ekonomi bagi keluarga. Namun, tetap diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kualitas pendidikan yang sama di setiap zona, sehingga manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan secara lebih merata.

4) Membangun Lingkungan yang Inklusif di Sekolah

Membangun interaksi sosial di lingkungan sekolah merupakan salah satu langkah penting untuk menciptakan suasana belajar yang rama dan bersatu. Ini dapat dicapai melalui partisipasi siswa dalam

kegiatan ekstrakurikuler, diskusi kelompok, dan kerja sama dalam kegiatan sekolah lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yermala Dewita S.Pd selaku Kepala Sekolah sekaligus Guru SMPN 3 Batusangkar, mengenai dampak sistem zonasi dalam membangun lingkungan yang inklusif di sekolah, menjelaskan bahwa:

“sistem zonasi ini tentu berdampak baik bagi kami SMPN 3 Batusangkar, dengan ini interaksi warga sekolah menjadi lebih bersatu. Hal ini bisa terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah, seperti pentas seni, kegiatan pramuka, belajar kelompok di dalam kelas maupun diperpustakaan maupun kegiatan-kegiatan sekolah lainnya.(sumber: wawancara Rabu 6 November 2024, di ruangan kepala sekolah, pukul 11.00 WIB)

Diperkuat dengan wawancara peneliti dengan Darma Yetti S.Pd Wakil Kesiswaan sekaligus Guru SMPN 3 Batusangkar, mengenai pertanyaan yang sama, menjelaskan bahwa:

“sistem zonasi ini berdampak baik bagi kami SMPN 3 Batusangkar, baik untuk guru, siswa maupun masyarakat sekitar. Dengan ini, interaksi antar warga sekolah maupun dengan masyarakat menjadi lebih dekat dapat bekerja sama. Dengan warga sekolah dapat dilihat dari berbagai kegiatan sekolah baik kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan lainnya. Dengan masyarakat, tentunya dapat dilihat interaksi warga sekolah dengan orang tua, hal ini bisa dilihat dari kegiatan rapat penting yang berhubungan dengan sekolah, yang diadakan oleh sekolah. Adapun kegiatan berupa sosialisasi-sosialisasi.”(sumber: wawancara Rabu 6 November 2024, di ruangan kepala sekolah, pukul 11.00 WIB)



Gambar 4.3 Belajar Kelompok Di Perpustakaan



Gambar 4.4 Kegiatan Jantung Sehat se-kecamatan Lima Kaum di SMPN 3 Batusangkar



Gambar 4.5 Kegiatan Lomba Nasyid se-Sumatera Barat di SMPN 3 Batusangkar

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkan sistem zonasi ini hubungan baik dengan sesama warga sekolah maupun dengan masyarakat semakin kuat, terbukti dengan kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Seperti kegiatan pada gambar 4.3 kegiatan belajar kelompok, gambar 4.4 dan gambar 4.5 yaitu kegiatan jantung sehat dan lomba nasyid, kegiatan tersebut dapat membangun interaksi sosial yang semakin kuat.

b. Dampak Negatif Sistem Zonasi PPDB SMPN 3 Batusangkar

Sistem zonasi tidak hanya memberikan dampak positif akan tetapi juga memberikan dampak negatif. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan bahwa sistem zonasi memberikan dampak negatif terhadap sekolah, guru, siswa, maupun orang tua/masyarakat. Berikut beberapa dampak dari sistem zonasi :

1). Keterbatasan Pemilihan Sekolah

Penerapan sistem zonasi membatasi kesempatan siswa dalam memilih sekolah sesuai dengan keinginan mereka. Siswa tidak dapat bebas menentukan sekolah berdasarkan preferensi pribadi atau kualitas pendidikan yang mereka harapkan. Sistem ini mengutamakan penerimaan peserta didik berdasarkan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah, sehingga siswa yang ingin bersekolah di luar zona tempat tinggalnya sering kali tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar, meskipun sekolah tersebut lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yermala Dewita S.Pd selaku kepala Sekolah SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana pandangan terkait sistem zonasi dalam PPDB terhadap pemilihan sekolah, menjelaskan bahwa:

“Menurut saya, sistem zonasi ini punya sisi negatif. Siswa yang berprestasi jadi terhalang untuk masuk ke sekolah unggulan hanya karena tempat tinggalnya di luar zona. Akhirnya, banyak orang tua yang tidak puas dengan sistem ini karena merasa anak mereka tidak mendapatkan kesempatan terbaik.”(sumber: wawancara, Rabu 6 November 2024, di ruang kepala sekolah, Pukul 11.00 WIB)

Diperkuat hasil wawancara peneliti dengan Ibu Darma Yetti S.Pd selaku wakil kesiswaan sekaligus guru SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana pandangan terkait sistem zonasi dalam PPDB, menjelaskan bahwa:

“Sistem zonasi membatasi pilihan siswa dalam menentukan sekolah yang sesuai dengan potensi mereka. Ada anak yang sebenarnya bisa berkembang lebih baik di sekolah tertentu, tapi karena sistem ini lebih mengutamakan jarak rumah daripada minat atau prestasi, mereka jadi tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Akibatnya, motivasi belajar mereka pun bisa berkurang.”(sumber: wawancara, Selasa 5 November 2024, di TU, Pukul 11.30 WIB)

Diperkuat hasil wawancara peneliti dengan Nailatul Qodriyah selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana pandangan terkait dampak sistem zonasi dalam PPDB terhadap pemilihan sekolah, menjelaskan bahwa:

“saya sebenarnya ingin masuk ke sekolah lain yang punya fasilitas lebih lengkap dan program unggulan yang sesuai dengan minat saya. Tapi karena rumah saya masuk zona SMPN 3 Batusangkar, saya tidak bisa mendaftar ke sekolah yang saya inginkan. Awalnya, saya kecewa karena merasa kurang cocok, tapi sekarang saya berusaha menyesuaikan diri. Tapi tetap saja, kalau boleh memilih, saya lebih suka sekolah lain yang lebih sesuai dengan cita-cita saya.”(sumber: wawancara, Selasa 5 November 2024, di gazebo Sekolah, Pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat hasil wawancara peneliti dengan Aulia Qory Andini selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana pandangan terkait dampak sistem zonasi dalam PPDB terhadap pemilihan sekolah, menjelaskan bahwa:

“Menurut saya, sistem ini kurang adil. Saya pengen masuk ke sekolah yang punya program unggulan, tapi nggak bisa karena aturan zonasi. Padahal, ada teman yang nilainya lebih rendah bisa masuk hanya karena rumahnya dekat.”(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di dalam kelas, Pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat hasil wawancara peneliti dengan Salwa Aprilia Carleka selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana pandangan terkait dampak sistem zonasi dalam PPDB terhadap pemilihan sekolah, menjelaskan bahwa:

“Saya suka sekolah di sini karena banyak teman-teman saya juga sekolah di sini. Tapi saya juga merasa kalau sistem ini bikin beberapa siswa yang lebih pintar kehilangan kesempatan buat dapat sekolah yang lebih baik.”(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di dalam Kelas, Pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat hasil wawancara peneliti dengan Adzka Adzkiya selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana

pandangan terkait dampak sistem zonasi dalam PPDB terhadap pemilihan sekolah, menjelaskan bahwa:

“Saya bersyukur karena sekolahnya dekat dan nggak perlu jauh-jauh. Tapi kalau dari segi kualitas, saya rasa masih banyak yang bisa ditingkatkan..”(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di ruang kelas, Pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat hasil wawancara peneliti dengan Adzka Adzkiya selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana pandangan terkait dampak sistem zonasi dalam PPDB terhadap pemilihan sekolah, menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya saya ingin masuk ke sekolah lain yang punya fasilitas lebih bagus, tapi karena rumah saya dekat dengan SMPN 3, saya harus sekolah di sini. Awalnya agak kecewa, tapi sekarang mulai terbiasa. Cuma, kalau boleh milih, saya tetap ingin sekolah di tempat lain yang lebih sesuai dengan keinginan saya.”(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di ruang kelas, Pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat hasil wawancara peneliti dengan Raudhatul Az Zahra selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana pandangan terkait dampak sistem zonasi dalam PPDB terhadap pemilihan sekolah, menjelaskan bahwa:

“Saya nggak masalah dengan zonasi, karena rumah saya dekat sama sekolah ini. Tapi teman saya ada yang sebenarnya lebih cocok di sekolah lain, tapi terpaksa sekolah di sini. Kalau menurut saya, lebih baik kalau sistem ini tetap ada, tapi ada pengecualian buat siswa berprestasi.”(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di ruang kelas, Pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat hasil wawancara peneliti dengan Nuri selaku siswa SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana pandangan terkait dampak sistem zonasi dalam PPDB terhadap pemilihan sekolah, menjelaskan bahwa:

“Jujur, saya sebenarnya pengen masuk sekolah lain karena saya lihat sistem pembelajarannya lebih bagus. Tapi karena aturan zonasi, saya nggak bisa daftar. Jadinya saya sekolah di sini aja, padahal saya lebih tertarik sama sekolah yang

lain.”(sumber: wawancara, Senin 11 November 2024, di ruang kelas, Pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat hasil wawancara peneliti dengan Atika Wali Murid SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana pandangan terkait dampak sistem zonasi dalam PPDB terhadap pemilihan sekolah, menjelaskan bahwa:

“Ibuk sebenarnya mendukung sistem zonasi karena anak saya jadi bisa sekolah lebih dekat dari rumah. Jadi lebih hemat ongkos dan waktu perjalanan. Tapi di sisi lain, saya juga melihat ada kekurangan. Anak saya sebenarnya ingin masuk sekolah lain yang lebih unggul di bidang akademik, tapi karena aturan zonasi, dia tidak bisa. Saya pikir sebaiknya ada pengecualian untuk anak-anak yang punya prestasi agar mereka bisa memilih sekolah yang lebih sesuai dengan bakatnya.”(sumber: wawancara Jum’at 8 November 2024, di rumah, Pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat hasil wawancara peneliti dengan Edra Wali Murid SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana pandangan terkait dampak sistem zonasi dalam PPDB terhadap pemilihan sekolah, menjelaskan bahwa:

“Dari sisi orang tua, zonasi ini ada positif dan negatifnya. Positifnya, anak-anak tidak perlu jauh-jauh ke sekolah, jadi lebih aman dan praktis. Tapi saya juga melihat ada teman anak saya yang pintar dan ingin masuk ke sekolah unggulan, tapi tidak bisa karena tempat tinggalnya di luar zona. Akhirnya mereka terpaksa sekolah di tempat yang sebenarnya kurang sesuai dengan keinginan mereka. Menurut saya, seharusnya ada jalur khusus bagi siswa yang punya prestasi atau minat tertentu agar mereka tetap bisa memilih sekolah yang lebih cocok.”(sumber: wawancara Sabtu 9 November 2024, di rumah, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan sistem zonasi memberikan dampak baik maupun dampak tidak baik bagi siswa. Dampak baiknya, memudahkan akses sekolah, menghemat biaya transportasi, dan meningkatkan keamanan, mendorong pemerataan pendidikan bagi semua siswa. Namun, dibalik dampak baiknya ada

pula dampak tidak baik dirasakan, Siswa berprestasi terhalang masuk sekolah unggulan karena aturan zonasi, Orang tua merasa kurang puas karena anak tidak bisa memilih sekolah sesuai minat.

2). Stigma Terhadap Sekolah Non-Favorit

Sistem zonasi sebenarnya dibuat untuk menghilangkan label sekolah favorit dan non-favorit. Namun, dalam kenyataannya, stigma itu masih ada. Sekolah yang berada di daerah kurang berkembang sering dianggap memiliki kualitas pendidikan yang lebih rendah. Akibatnya, baik siswa maupun orang tua cenderung enggan memilih sekolah tersebut, meskipun secara zonasi mereka seharusnya bersekolah di sana. Hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua jika sekolah dalam zona mereka tidak sesuai dengan harapan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yermala Dewita S.Pd selaku kepala Sekolah SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana pandangan terkait sistem zonasi dalam PPDB terhadap sekolah stigma sekolah favorit dan non-favorit, menjelaskan bahwa:

“Memang masih ada anggapan seperti itu di masyarakat. Sekolah-sekolah yang sebelumnya dianggap unggulan tetap menjadi incaran utama, sementara sekolah lain, termasuk sekolah kami, sering kali dipandang sebagai pilihan terakhir. Padahal, dengan sistem zonasi, pemerintah ingin meratakan kualitas pendidikan. Kami di sekolah juga terus berusaha meningkatkan mutu agar stigma ini bisa berkurang. Dampaknya cukup terasa. Ada orang tua yang masih mencari cara agar anaknya bisa bersekolah di sekolah yang mereka anggap favorit, misalnya dengan memanipulasi alamat. Namun, ada juga peningkatan jumlah siswa karena mereka tidak punya pilihan lain selain bersekolah di sekolah yang sesuai zonasi mereka.”(sumber: wawancara, Rabu 6 November 2024, di ruang kepala sekolah, Pukul 11.00 WIB)

Diperkuat hasil wawancara peneliti dengan Darma Yetti S.Pd selaku Wakil Kesiswaan sekaligus Guru SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana pandangan terkait sistem zonasi dalam PPDB

terhadap sekolah stigma sekolah favorit dan non-favorit, menjelaskan bahwa:

“sistem zonasi ini bertujuan untuk menghilangkan stigma sekolah favorit dan non-favorit, namun dalam penerapannya masih ada masyarakat yang berfikir sekolah favorit dan non-favorit.”(sumber: wawancara, Selasa 5 November 2024, di TU, Pukul 11.30 WIB)

Kemudian diperkuat hasil wawancara peneliti dengan Atika Wali Murid SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana pandangan terkait sistem zonasi dalam PPDB terhadap sekolah stigma sekolah favorit dan non-favorit, menjelaskan bahwa:

“iya masih ada anggapan sekolah favorit dan non-favorit itu. Banyak orang tua yang tetap berusaha agar anaknya masuk ke sekolah yang dianggap lebih bagus. Sebagai orang tua siswa, saya juga merasa kurang puas jika pilihan sekolah dalam zona yang tersedia memiliki kualitas pendidikan yang tidak memadai dan tidak sesuai dengan harapan. Tapi kalau semua sekolah bisa ditingkatkan kualitasnya, mungkin lama-lama anggapan ini akan hilang.”(sumber: wawancara Jum’at 8 November 2024, di rumah, Pukul 10.00 WIB)

Kemudian diperkuat hasil wawancara peneliti dengan Edra Wali Murid SMPN 3 Batusangkar, mengenai bagaimana pandangan terkait sistem zonasi dalam PPDB terhadap sekolah stigma sekolah favorit dan non-favorit, menjelaskan bahwa:

“iya, anggapan sekolah unggul dan tidak unggul itu masih ada. Masih banyak orang tua yang ingin berusaha untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang dianggap unggul. Saya merasa cemas jika sekolah dalam zona saya memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain.”(sumber: wawancara Sabtu 9 November 2024, di rumah, Pukul 10.00 WIB)

Dapat disimpulkan bahwa masih ada anggapan sekolah favorit dan non-favorit dikalangan masyarakat. Sebagai orang tua siswa, mereka merasa kurang puas dengan pilihan sekolah dalam zona jika kualitas pendidikannya tidak memenuhi harapan. Kami juga khawatir apabila sekolah di dalam zona memiliki standar

yang lebih rendah dibandingkan sekolah lain. Kekhawatiran ini menunjukkan betapa pentingnya pemerataan kualitas pendidikan di setiap sekolah dalam sistem zonasi agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pendidikan anak-anak.

Berdasarkan studi yang diteliti melalui wawancara dengan beberapa informan di SMPN 3 Batusangkar, dan data dikumpulkan melalui pendekatan triangulasi sumber, peneliti mengecek data yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa sistem zonasi PPDB ini memberikan dampak bagi sekolah, guru, siswa maupun wali murid di SMPN 3 Batusangkar. Tentu dampak itu berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya dapat memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh siswa, itu terbukti dengan meningkatnya jumlah siswa di SMPN 3 Batusangkar pada tahun 2022 sampai 2024. Selain itu, memudahkan guru dalam mengajar. Dengan siswa berasal dari daerah dan lingkungan yang sama, guru akan mudah dalam mengajar tanpa harus membedakan cara mengajar. Sistem ini juga dapat mendekatkan siswa sekolah dekat dengan tempat tinggal. Siswa tidak perlu perjalanan jauh lagi untuk pergi sekolah, dan juga dapat menghemat energi siswa. Sehingga, siswa nanti dapat fokus belajar dalam kelas dan tanpa mengganggu jam pelajaran karena terlambat. Kemudian sistem ini juga menguntungkan bagi sekolah, karena dapat membangun lingkungan yang inklusif dan kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar. Dimana orang tua dapat berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatan sekolah, sehingga dapat membangun hubungan yang erat antara sekolah dan orang tua. Kemudian berdampak juga terhadap biaya transportasi, dimana siswa dan orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk transportasi.

B. Pembahasan

1. Sistem Zonasi

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan jarak domisili dengan sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Nomor 14 Tahun 2018, yang dalam Pasal 16 Ayat (1) menyatakan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dalam zona terdekat dari sekolah dengan kuota minimal 90% dari total penerimaan siswa baru. Kebijakan ini kemudian disempurnakan melalui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 mengenai penerimaan peserta didik baru di berbagai jenjang pendidikan. Dalam aturan tersebut, Pasal 11 Ayat (1) menetapkan bahwa PPDB dilakukan melalui empat jalur, yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi. Adapun pembagian daya tampungnya adalah 50% untuk zonasi, 15% untuk afirmasi, 5% untuk perpindahan tugas orang tua, dan 30% untuk jalur prestasi.

Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru menggunakan kriteria jarak dan radius sebagai dasar seleksi. Kebijakan ini wajib diterapkan oleh sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem zonasi PPDB ini bertujuan untuk memastikan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mendasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah. Dalam sistem ini, pemerintah daerah menentukan zona berdasarkan radius tertentu, dan sekolah diwajibkan menerima calon siswa yang tinggal di zona terdekat. Ada persentase tertentu dari total kapasitas siswa baru yang dialokasikan bagi siswa yang tinggal dalam radius ini, dengan harapan menghapus label sekolah unggul dan sekolah tidak unggul sehingga tercapai kualitas pendidikan yang merata di semua sekolah di Indonesia.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus dilakukan dengan prinsip-prinsip utama: tidak diskriminasi, objektif, transparan, akuntabel,

dan adil, sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Ini berarti bahwa proses PPDB harus terbuka untuk umum, memberikan peluang yang sama bagi setiap orang tua untuk mendaftarkan anak mereka ke sekolah terdekat dari tempat tinggal mereka. Sistem zonasi ini bertujuan membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang merata sesuai dengan wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB memberikan kesempatan kepada setiap sekolah untuk memperlakukan semua siswa secara setara dan mendorong sekolah untuk memberikan layanan terbaik. Untuk mencapai pemerataan pendidikan yang adil dan berkualitas, sistem zonasi dalam PPDB perlu dikembangkan dan dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan. Sistem ini dirancang yang merata dan berkualitas, dengan memperhatikan kondisi geografis dan demografis calon siswa.

2. Dampak Positif Sistem Zonasi PPDB

Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan siswa baru berdasarkan wilayah tempat tinggal. Kebijakan ini diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bertujuan untuk memastikan akses yang lebih merata terhadap pendidikan berkualitas dan mengurangi kesenjangan pendidikan diberbagai daerah.

Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru memberikan dampak positif dalam memudahkan akses layanan dan kualitas pendidikan. dengan kebijakan ini, siswa dapat bersekolah di institusi yang dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga jarak dan waktu perjalanan dapat diminimalisir. Selain mengurangi biaya transportasi bagi orang tua, kebijakan ini juga memberikan siswa lebih banyak waktu untuk belajar dan beristirahat. Sistem zonasi juga mendorong pemerataan kualitas pendidikan, karena sekolah-sekolah diberbagai daerah mendapat perhatian yang lebih seimbang. Akibatnya,

setiap siswa memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa memperhitungkan faktor geografis. Sistem ini juga membantu mengurangi kepadatan di sekolah-sekolah favorit, sehingga sumber daya pendidikan dapat terdistribusikan secara lebih adil. Secara keseluruhan, zonasi berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan merata untuk semua siswa.

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan peneliti di SMPN 3 Batusangkar, ditemukan sistem zonasi memberikan dampak positif terhadap sekolah tersebut, yakni sebagai berikut:

a) Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan

Sistem zonasi PPDB memprioritaskan penerimaan siswa yang tinggal di dekat dengan sekolah. Kebijakan ini berusaha memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latarbelakang sosial atau ekonomi, memiliki peluang yang sama untuk masuk ke sekolah negeri. Hal ini diharapkan mengurangi praktik diskriminasi berdasarkan nilai akademis atau kemampuan ekonomi dan menciptakan pemerataan pendidikan disemua kalangan.

Berdasarkan hasil penelitian di SMPN 3 Batusangkar ditemukan bahwa penerapan sistem zonasi PPDB di SMPN 3 Batusangkar memberikan dampak positif terhadap sekolah. Sistem zonasi PPDB dapat menghilangkan sekolah-sekolah yang berlabel favorit yang selama ini menjadi pilihan utama siswa, sehingga mereka hanya dapat memilih sekolah dalam zona mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan jumlah pendaftar di SMPN 3 Batusangkar, tetapi juga dapat meningkatkan jumlah siswa yang lebih merata. Dengan demikian, sistem zonasi PPDB dapat membawa dampak positif dengan menghapuskan label sekolah favorit dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua siswa.

Penjelasan tersebut sejalan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh (Salim dan Nora, 2022) yang berjudul

“Dampak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi (Studi Kasus: Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar di Kecamatan Matur).”, mengatakan bahwa penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) membawa dampak positif bagi sekolah-sekolah. Citra sekolah unggul yang biasanya mempengaruhi pemilihan sekolah kini menjadi lebih terbatas, sehingga orangtua atau wali murid harus mendaftarkan anaknya ke sekolah yang terdekat. Diskriminasi antara sekolah unggul dan non-unggul yang sebelumnya dikhawatirkan oleh pemerintah juga mulai teratasi berkat kebijakan ini.

Penjelasan di atas juga didukung oleh penelitian dari (Dewi, 2021) yang berjudul “Dampak kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Magelang bagi sekolah dan peserta didik.”, menyatakan bahwa Dampak kebijakan PPDB berbasis sistem zonasi berpengaruh terhadap sekolah dan peserta didik. Kebijakan PPDB berbasis zonasi bertujuan untuk menghilangkan label favorit pada sekolah-sekolah.

Kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan wilayah bertujuan untuk menghilangkan stigma masyarakat terhadap sekolah unggul. Selama ini, hanya siswa yang cerdas dan berprestasi yang biasanya dapat masuk sekolah-sekolah unggulan tersebut. Akibatnya, sekolah yang dianggap non-unggulan sering kali diberi label sebagai tempat bagi siswa yang kurang cerdas secara akademis. Sekolah-sekolah favorit cenderung lebih berkembang karena para siswanya secara rutin meraih berbagai prestasi. Namun, dengan penerapan sistem zonasi, diharapkan siswa akan tersebar lebih merata sesuai dengan lokasi tempat tinggal mereka. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan persaingan yang sehat di setiap sekolah. Sistem zonasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan dan pencapaian prestasi di semua sekolah, sehingga semua sekolah memiliki daya

saing dan bukan hanya sekolah unggulan yang menjadi tujuan siswa berprestasi.

b) Mengurangi Biaya Transportasi dan Menghemat Biaya Beban Finansial

Sistem zonasi dalam PPDB juga berdampak baik terhadap akses transportasi dan mengurangi beban finansial bagi siswa. Siswa diharapkan bisa bersekolah lebih dekat dengan rumah, sehingga dapat mengurangi biaya transportasi, hal ini menguntungkan bagi siswa namun juga menguntungkan bagi orang tua secara finansial.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan di SMPN 3 Batusangkar menunjukkan bahwa sistem zonasi memberikan dampak positif bagi siswa. Salah satunya adalah menghemat biaya pengeluaran dan jarak tempuh yang dekat.

Hasil penelitian ini sekaligus mendukung kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Iriany et al., 2019) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Garut.” Menyebutkan bahwa sistem zonasi menguntungkan siswa dalam menghemat biaya pengeluaran dan jarak tempuh yang dekat.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan di SMPN 3 Batusangkar menunjukkan bahwa sistem zonasi memberikan dampak positif bagi orang tua siswa. Salah satunya dapat menghemat pengeluaran biaya transportasi dan biaya harian seperti bensin atau ongkos kendaraan umum.

Sistem zonasi berdampak positif terhadap pengeluaran transportasi bagi orang tua. Dengan anak-anak bersekolah di dekat rumah, biaya harian untuk transportasi, seperti bensin atau ongkos kendaraan umum, menjadi lebih ringan. Selain penghematan biaya, orang tua juga merasa lebih tenang karena waktu tempuh yang lebih singkat, sehingga anak-anak dapat berangkat dan pulang sekolah dengan lebih aman.

Hasil penelitian ini sekaligus mendukung kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Said et al., 2023) yang berjudul “Evaluasi Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.”, menyebutkan bahwa Sistem zonasi PPDB dianggap membawa manfaat positif bagi masyarakat, terutama bagi orang tua dan keluarga yang memiliki anak atau anggota keluarga yang membutuhkan akses pendidikan menengah (SMPN dan SMAN) di lingkungan sekitar mereka. Manfaat tersebut mengurangi biaya transportasi. Selain menghemat biaya transportasi, sistem zonasi juga dapat mengurangi resiko keterlambatan ke sekolah.

Penelitian ini juga di dukung oleh penelitian (Damayanti et al., 2024) yang berjudul “Analisis Fungsi Dan Disfungsi Kebijakan Sistem Zonasi Di Smp Kabupaten Karanganyar.” Menyebutkan bahwa sistem zonasi berdampak positif dapat menghemat biaya dan waktu.

Temuan ini juga didukung oleh penelitin (Mallevi Agustin Ningrum et al., 2022) yang berjudul “Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan.” Menyebutkan bahwa dampak positif yang muncul dengan kebijakan ini adalah anak yang rumahnya terdekat dengan sekolah lebih diprioritaskan untuk diterima oleh sekolah, orangtua dapat menghemat biaya transport saat anak pergi dan pulang dari sekolah.

3. Dampak Negatif Sistem Zonasi PPDB

Sistem zonasi muncul sebagai tanggapan terhadap keluhan orang tua yang merasa tersisihkan karena sekolah yang diinginkan lebih mengutamakan siswa dengan nilai tinggi. Akibatnya, orang tua harus mencari sekolah lain yang dapat menerima anak mereka. Namun, hal ini sering membuat jarak dari rumah ke sekolah menjadi lebih jauh, atau

memaksa mereka untuk memilih sekolah swasta yang biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah negeri. Kondisi ini jelas menjadi beban bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian di SMPN 3 Batusangkar, ditemukan bahwa sistem zonasi membatasi siswa dalam memilih sekolah sesuai keinginan mereka.

Temuan tersebut senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Parameswara et al., 2022) yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi bagi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.” Menemukan bahwa Kebijakan sistem zonasi membatasi kebebasan peserta didik dalam memilih sekolah yang mereka inginkan.

Kemudian hasil penelitian yang ditemukan di SMPN 3 Batusangkar bahwa sistem zonasi berdampak pada terbatasnya pilihan sekolah bagi siswa ke luar zona. Buktinya dari wawancara banyak siswa yang mengeluh dengan keterbatasan mereka memilih sekolah. Sebelumnya mereka ingin sekolah di luar zona. Namun, sistem zonasi berdasarkan jarak sekolah dengan domisili, siswa yang tinggal dekat dengan sekolah ingin sekolah ke luar zona, jadi tidak bisa sekolah ke luar zona.

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kebijakan yang diterapkan untuk mendekatkan peserta didik dengan sekolah di wilayah tempat tinggal mereka. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan akses pendidikan secara lebih merata, mengurangi ketimpangan kualitas sekolah, dan menghapus stigma sekolah favorit. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini sering kali menimbulkan beberapa masalah atau ketidaktepatan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan kekurangan atau ketidaktepatan sistem zonasi:

a) Keterbatasan Pilihan Sekolah Bagi Siswa

Sistem zonasi membatasi siswa untuk memilih sekolah berdasarkan minat, bakat, atau preferensi mereka. Siswa dengan

potensi akademik tinggi bisa jadi tidak bisa masuk ke sekolah berkualitas hanya karena tempat tinggal mereka berada di zona yang kurang mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan SMPN 3 Batusangkar, bahwa dengan adanya sistem zonasi ini, baik siswa dan orang tua mendapatkan dampak tidak baik terhadap pilihan sekolah. Siswa dan orang tua terbatas dalam memilih sekolah, siswa ingin sekolah ke luar dari zonanya sekarang sudah tidak bisa. Karena sistem zonasi ini berdasarkan jarak sekolah dekat dengan tempat tinggal siswa.

b) Stigma Terhadap Sekolah Non-Favorit

Meskipun tujuan zonasi adalah menghilangkan label sekolah favorit, stigma ini tetap ada. Sekolah yang berada di zona yang kurang maju sering dianggap kurang berkualitas. Orang tua dan siswa merasa enggan untuk masuk ke sekolah di wilayah tersebut, meskipun sudah berada dalam zona.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan SMPN 3 Batusangkar, bahwa masih banyak anggapan mengenai sekolah favorit dan non-favorit ini. Orang tua selalu berusaha untuk mencarikan anak mereka sekolah yang dianggap unggul dan memiliki fasilitas dan kualitas yang unggul

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMPN 3 Batusangkar dengan berjudul Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMPN 3 Batusangkar,” dapat disimpulkan bahwa ada beberapa dampak positif dan negatif dari penerapan sistem zonasi di sekolah tersebut. antara lain: 1) Dampak Positif dari penerapan sistem zonasi PPDB: a Memberikan keuntungan bagi siswa yang tinggal dekat dengan sekolah, karena memudahkan mereka untuk diterima. b Mempermudah akses ke sekolah, seperti biaya transportasi dan dapat menghemat waktu perjalanan ke sekolah. c Mengurangi siswa untuk bersekolah di luar zona tempat tinggalnya. d Memastikan semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan tanpa diskriminasi. e Mempermudah orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka. 2) Dampak Negatif dari penerapan sistem zonasi PPDB: a. Keterbatasan pilihan sekolah bagi siswa dan orang tua. b. Masih adanya stigma sekolah Non-Favorit

B. Saran

Berdasarkan penelitian terkait Dampak Kebijakan Sistem Zonasi PPDB di SMPN 3 Batusangkar, berikut beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait:

1. Untuk SMPN 3 Batusangkar

Diharapkan untuk mengembangkan program unggulan dan ekstrakurikuler untuk meningkatkan daya tarik sekolah serta membangun reputasi yang lebih baik di mata masyarakat. Melakukan pendekatan kepada siswa dan orang tua agar mereka lebih merasa nyaman dan menerima sekolah sebagai tempat belajar yang berkualitas. Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat sekitar untuk mendukung kegiatan sekolah dan meningkatkan citra sekolah.

2. Untuk Pemerintah

Diharapkan melakukan evaluasi dan pemantaun berkala terhadap pelaksanaan sistem zonasi untuk memastikan tujuan utama kebijakan ini tercapai.

3. Untuk Siswa, Orang Tua, dan Masyarakat

Dapat menghilangkan pola pikir bahwamasih ada sekolah unggul atau favorit maupun non-favorit.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Admin SMP ditsmp.kemdikbud. (2021). *5 Alur Proses Pelaksanaan PPDB yang Wajib Diketahui Calon Peserta Didik*. 10 Mei 2021.
- Almasri, Marjoni Imamora, Demina, Khairat, A. (2023). ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 1 BUKITTINGGI. *I S L A M I K A, Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan p-ISSN*, 5(3), 954–966. <https://doi.org/https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3450>
- Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Ashari, A. (2017). Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online. In *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Profesionalisme Pendidik Untuk Membangun Karakter Anak Bangsa*.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Case Study Method in Qualitative Research. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Cahyani, A. P. S., Aini, P. A., & Nawangsari, E. R. (2020). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya. *Syntax Transformation*, 1(3), 1–6.
- Chan, F., Rimba, A., Setiawati, R., Nurlayly, C., & Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi, P. (2019). Dampak Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru. *Dikdas Matappa: Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*, 2(2), 326–330.
- Damayanti, M. A., & , Atik Catur Budiati, S. I. L. (2024). ANALISIS FUNGSI DAN DISFUNGSI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DI SMP KABUPATEN KARANGANYAR. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(02), 476–490.
- Darwis, M. (2020). Problematika sosial sistem zonasi. *Jurnal Sipatokong*, 1(3), 294–297.
- Desi Wulandari, Adelina Hasyim, Y. N. (2018). Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 1(1), 1–15.
- Dewi, K. P. (2021). Dampak kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Magelang bagi sekolah dan peserta didik. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 5(1), 1–8.

- Elvira, E. (2021). Faktor Penyebab Rendahnya Kualitas Pendidikan dan Cara Mengatasinya (Studi pada : Sekolah Dasar di Desa Tonggolobibi). *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 16(2), 93–98. <https://doi.org/10.56338/iqra.v16i2.1602>
- Hariyati, S. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintah*, 3(2), 585–596.
- Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Panduan Penelitian Peserta Contoh Proposal Kualitatif*. Alfabeta, CV.
- Iriany, I. S., Adnan, I. Z., & Rachmawati, Y. (2019). PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN GARUT. *Pembangunan Dan Kebijakn Publik*, 11(02), 15–20.
- Khadowmi Reza, E. (2019). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP PROSES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH*.
- Larasati, M. (2022). kualitas pendidikan di indonesia. *Journal of Education and Language Research*, 8721(8.5.2017), 2003–2005.
- Madiana, I., Alqadri, B., Sumardi, L., & Mustari, M. (2022). Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2c), 735–740. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.633>
- Malimbe, A. (2021). Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1), 1–10.
- Mallevi Agustin Ningrum, Suryanti, & Wiryanto. (2022). Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 932–940. <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i3.2661>
- Marsanda. (2022). Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi bagi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9570–9578.
- Novrian Satria Perdana. (2019). Ketercapaian Sekolah Berasrama Dalam Upaya Peningkatan Mutu Dan Akses Pendidikan. *Edutech*, 18(2), 219–237. <https://doi.org/10.17509/e.v18i2.15127>
- Nur Cudai, A. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.

- Nurlailiyah, A. (2022). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa Smp Di Yogyakarta. *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 17(1), 13–22. <https://doi.org/10.30762/realita.v17i1.1381>
- Parameswara, M. C., Iskandar, M. F., & Amelia, R. F. (2022). Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi bagi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9570–9578.
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi Ppdb Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78. <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>
- Permendikbud No. 44. (2019). Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. *Permendikbud*, 1–25.
- Ramadhan, G. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Kualitas Pendidikan Di Sma Negeri 3 Kota Jambi. *Skripsi Universitas Jambi*.
- Ramadhani, A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(01), 1–12.
- Rindang. (2023). Pelaksanaan Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh. *Skripsii UIN Suska Syarif Kasim Riau*.
- Risna, Lisdahlia, & Edi, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan. *Mappesona*, 2(1), 1.
- Said, R., Ramli, A., & Wahyuti, S. (2023). Evaluasi Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Journal on Education*, 5(4), 12066–12084. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2167>
- Salim, F. P., & Nora, D. (2022). Dampak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi (Studi Kasus: Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar di Kecamatan Matur). *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 1(1), 67–77. <https://doi.org/10.24036/nara.v1i1.20>
- Satria, B. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 Di Kota Pekanbaru. *Universitas Islam Riau*, 1–122.
- satria, D. (2019). *Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Bandar Lampung*.
- Selvia Wulandari Zulham. (2022). PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM

ZONASI DALAM REKRUTMEN PESERTA DIDIK TINGKAT SEKOLAH DASAR DI DINAS PENDIDIKAN GAYO LUES. *Skripsi UIN Ar-Raniry*, 8.5.2017, 2003–2005.

- Sri Yustikia, N. W. (2019). Pentingnya Sarana Pendidikan Dalam Menunjang Kualitas Pendidikan Di Sekolah. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 4(2), 1. <https://doi.org/10.25078/gw.v4i2.1053>
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan Dan Penelitian Evaluasi)*. Alfabeta.
- Suryaningrum, S. (2024). *Ilmu Pendidikan*. CV.REY MEDIA GRAFIKA.
- Syusilayarni, S., Isjoni, I., & Azhar, A. (2021). Analisis Penerapan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di Smp Negeri Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal JUMPED (Jurnal Manajemen Pendidikan)*, 9(1), 67–81. <https://doi.org/10.31258/jmp.9.1.p.67-81>
- Thoha, M., & Ghazali, H. A. (2020). Dampak Penerapan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 141. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v15i1.3302>
- Uddin B. Sore. (2017). *Kebijakan Publik*. CV Sah Media.
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.28926/briliant.v5i1.375>
- Utami, L. A., Ishaq, A., & Maulidiyah, N. (2018). Analisa Pengaruh Kualitas Website PPDB Terhadap Kepuasan Pengguna. *Sinkron, Jurnal & Penelitian Teknik Informatika*, 3(1), 31–37. <https://doi.org/10.33395/sinkron.v3i1.10146>
- Wahyuni, D. (2024). *PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2023 / 2024 JALUR ZONASI*. XV(16).
- Werdiningsih, R. (2020). KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT PENDIDIKAN. *Public Service and Governance Journal*, 1(02), 181–199. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/psgj.v1i02.1562>
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>

Zakaria, M. A. (2022). Dampak pembatasan pembelajaran luring pasca pandemi covid 19 terhadap kegiatan pembelajaran pada siswa sma muhammadiyah 1 ponorogo. *Sripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.

Zidane Al Yasmin. (2023). PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMA NEGERI 1 CILACAP. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 12(2), 79–96.